



Laporan Lapangan

Studi Keluar dari Kemiskinan

**Kasus di Komunitas
RW 4, Dusun Kiuteta,
Desa Noelbaki,
Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang,
Nusa Tenggara Timur**

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu dan tidak berhubungan atau mewakili Lembaga Penelitian SMERU maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-31936336; Faks: 62-21-31930850; E-mail: smeru@smeru.or.id; Web: www.smeru.or.id

Akhmadi

Desember 2006

FIELD REPORT

**Studi Keluar dari Kemiskinan
Kasus di Komunitas RW 4, Dusun Kiuteta, Desa Noelbaki,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang,
Nusa Tenggara Timur**

Akhmadi

**Peneliti Lapangan
(Nusa Tenggara Timur)**

Harry DJ Foenay
Herman Umbu Reda Zogara
Yans A. Koliham
Agustinus Mahur

Lembaga Penelitian SMERU

Desember 2006

Studi Keluar dari Kemiskinan: Kasus di Komunitas RW 4, Dusun Kiuteta, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur/Akhmadi et al. – Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2006.

vii, 58 p. ; 31 cm. – (Laporan Lapangan SMERU, Desember 2006)

ISBN 978-979-3872-36-0

I. Kemiskinan

I. SMERU

II. Akhmadi

362.5/DDC 21

Studi Keluar dari Kemiskinan Kasus di Komunitas RW 4, Dusun Kiuteta, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

ABSTRAK

Laporan lapangan Studi Keluar dari Kemiskinan di Kabupaten Kupang merupakan bagian dari studi yang lebih besar, yaitu Studi Keluar dari Kemiskinan di Wilayah Timor Barat. Kabupaten Kupang memiliki pengungsi eks-Timor Timur yang berjumlah sedang sehingga diperkirakan tingkat konflik sosialnya pun sedang.

Melalui studi ini kembali dibuktikan bahwa motivasi individu/masyarakat merupakan modal utama untuk dapat keluar dari kemiskinan. Motivasi yang tercermin dari kemauan kuat untuk bekerja keras dan didukung dengan pendidikan dan keterampilan masyarakat, serta ditunjang berbagai program pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat merupakan modal yang sangat berharga bagi masyarakat lokal untuk mempercepat keluar dari kemiskinan (*moving out of poverty*). Percepatan peningkatan kesejahteraan ini tersendat dengan keberadaan pengungsi di desa ini. Kasus pencurian, pertikaian, perkelahian antara masyarakat dengan pengungsi merupakan kejadian yang sering ditemui, yang akhirnya menghambat masyarakat untuk keluar dari kemiskinan lebih cepat. Yang paling parah adalah yang dialami masyarakat yang mengalami penurunan kesejahteraan (*faller*). Di satu sisi mereka gemar berjudi, mabuk-mabukan, perebutan warisan intrakeluarga, dan menghadapi faktor yang sulit dihindari seperti penuaan. Di sisi lain, dengan keberadaan pengungsi di desa tersebut telah terjadi peningkatan pencurian harta benda, perkelahian atau pertikaian antara masyarakat lokal dengan pengungsi, juga persaingan memperebutkan sumber-sumber ekonomi terutama dalam bermata pencaharian.

Oleh karena itu, pemberian motivasi dan bantuan program melalui berbagai pelatihan, serta bantuan modal merupakan kombinasi bantuan nyata dan sangat diharapkan oleh masyarakat, selain penyelesaian masalah pengungsi secara menyeluruh.

Kata kunci: motivasi, kesejahteraan, program, pengungsi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. LOKASI PENELITIAN DAN KONTEKS LOKAL	4
A. Gambaran Umum Kabupaten Kupang	4
B. Gambaran Umum Desa dan Komunitas	5
C. Kondisi Kemiskinan di Wilayah Penelitian	7
III. MOBILITAS SOSIAL EKONOMI PADA TINGKAT-TINGKAT YANG BERBEDA: PERSPEKTIF DARI BAWAH	8
A. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Tingkat Komunitas	8
B. Tingkat Komunitas	11
C. Tingkat Rumah Tangga/Individu	13
IV. FOKUS KEBIJAKAN, KONDISI INFRASTRUKTUR, DAN MOBILITAS	15
A. Faktor Kebijakan dan Kondisi Infrastruktur	15
B. Tingkat Komunitas	16
C. Tingkat Rumah Tangga/Individu	17
V. FAKTOR-FAKTOR SOSIAL DAN MOBILITAS	19
A. Stratifikasi Sosial pada Komunitas	19
B. Modal Sosial dan Mobilitas	20
C. Faktor-faktor Sosial Lainnya yang Penting pada Tingkat Komunitas dan Rumah Tangga/Individual	20
VI. FAKTOR-FAKTOR POLITIK DAN MOBILITAS	22
A. Praktik Pelaksanaan Demokrasi Lokal	22
B. Praktik Tata Kelola Pemerintahan Lokal	23
C. Arti Penting Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal terhadap Kesejahteraan Komunitas	25
D. Arti Penting Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal terhadap Masyarakat untuk Keluar dari Kemiskinan	25
VII. KESENJANGAN DAN MOBILITAS	27
A. Kesenjangan pada Tingkat Komunitas	27
B. Kesenjangan Ekonomi pada Tingkat Rumah Tangga/Individual	28
C. Jenis-jenis Kesenjangan Lainnya	29
VIII. KEBEBASAN, KEKUASAAN, AGENSI INDIVIDUAL, DAN MOBILITAS	30
A. Memahami Kebebasan dan Kekuasaan: Perspektif dari Bawah pada Tingkat Komunitas	30
B. Agensi Individual dalam Sejarah Hidup: Ilustrasi pada Tingkat Rumah Tangga	32

IX. KONFLIK DAN MOBILITAS	35
A. Keamanan Lokal dan Keselamatan Publik	35
B. Sejarah Umum Konflik dan Peta Kelembagaan Konflik-Konflik yang Paling Penting	36
C. Dampak Konflik	37
X. STUDI KASUS: PENGUNGGI: DILEMA ANTARA DAMPAK YANG DITIMBULKAN TERHADAP LINGKUNGAN DAN PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN (STUDI KASUS DI DESA NOELBAKI)	39
A. Sejarah Desa	39
B. Kedatangan Pengungsi	39
C. Dampak Kehadiran Pengungsi Secara Umum	40
D. Awal Konflik: Pemukulan terhadap Kepala Dusun Kiuteta	40
E. Kepemilikan Lahan	43
F. Dampak Pengungsi terhadap Pemanfaatan Lahan	43
G. Dampak Kehadiran Pengungsi terhadap Lingkungan	44
H. Bantuan Pemerintah dan Harapan Masyarakat Lokal	45
XI. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	47
A. Kesimpulan	47
B. Implikasi Kebijakan	47
DAFTAR PUSTAKA	49
DAFTAR LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pengungsi di NTT, 2005	2
Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Penduduk di NTT, Kabupaten Kupang, dan Kecamatan Kupang Tengah, 2004	4
Tabel 2.2. Luas Wilayah dan Penduduk Desa Noelbaki, Dusun Kiuteta, dan RW 4, Tahun 2004	6
Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, dan Desa Noelbaki, 2002	7
Tabel 3.1. Indeks Kondisi Kesejahteraan Hasil Identifikasi FGD Tangga Kehidupan Kelompok Laki-Laki dan Kelompok Perempuan	11

DAFTAR SINGKATAN & AKRONIM

BBI	: Balai Benih Induk
BBIP	: Balai Benih Induk Pertanian
BBM	: bahan bakar minyak
BIPP	: Balai Informasi Penyuluhan Pertanian
BLPP	: Balai Latihan Penyuluh Pertanian
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPS	: Badan Pusat Statistik
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	: <i>focused groups discussion</i> /diskusi kelompok terarah
Hansip	: pertahanan sipil
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KK	: kepala keluarga
KUT	: kredit usaha tani
Linmas	: perlindungan masyarakat
LoL	: <i>Ladder of Life</i> /tangga kehidupan, tangga kesejahteraan
LSM	: lembaga swadaya masyarakat
Muspida	: musyawarah pimpinan daerah
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PKK	: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PPK	: Program Pengembangan Kecamatan
Pospol	: pos polisi
SD	: Sekolah Dasar
SLPHT	: Sekolah dan Latihan Pemberantasan Hama Terpadu
Suseda	: survei sosial ekonomi daerah
TLM	: <i>Tanaoba Lais Manekat</i> /(melayani dengan kasih)
UBSP	: usaha bersama simpan pinjam
UKM	: usaha kecil dan menengah
YIS	: Yayasan Indonesia Sejahtera
ZEEI	: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Studi “Keluar dari Kemiskinan” di Kabupaten Kupang dilakukan di Desa Noelbaki sebagai desa penelitian dengan pertimbangan bahwa banyaknya pengungsi pada tingkat “sedang atau menengah”, berada di antara Kabupaten Belu (yang paling banyak jumlah pengungsinya) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (yang sedikit jumlah pengungsinya). Komunitas yang dipilih adalah komunitas di wilayah RW 4, Dusun Kiuteta yang wilayahnya digunakan untuk penampungan sebagian besar pengungsi yang ada di Desa Noelbaki.

Jumlah pengungsi yang tiba pertama kali di Desa Noelbaki pada 14 September 1999 sebanyak 17 ribuan jiwa. Jumlah ini tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan penduduk lokal. Pada awalnya proses berjalan damai, tidak bermasalah, dan diterima dengan baik oleh warga masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Ketegangan mulai timbul tiga minggu kemudian saat penduduk lokal merasa tersinggung akibat ulah pengungsi yang menolak dan membuang makanan yang telah disediakan penduduk lokal. Rentetan kejadian setelahnya pun timbul seperti: perkelahian antara penduduk lokal dengan pengungsi karena masalah sepele, yaitu pencurian sandal, makin maraknya pencurian ternak/buah/kayu bakar di desa, persaingan berusaha antara penduduk lokal dengan pengungsi dalam mencari penghidupan/mata pencaharian, penggunaan lahan penduduk lokal oleh para pengungsi, dan lain sebagainya. Perkelahian antara penduduk lokal dengan pengungsi merupakan awal sekaligus puncak konflik antara penduduk lokal dengan para pengungsi. Kejadian ini membuat sebagian penduduk lokal, khususnya perempuan dan anak-anak mengungsi ke luar desa selama sekitar satu minggu. Walaupun telah dilakukan kesepakatan damai di antara kedua belah pihak, namun ketegangan masih berlangsung hingga kini.

Keberadaan pengungsi di komunitas ini tidak saja berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk lokal semata, tetapi juga meluas pada penggunaan lahan, pencemaran lingkungan, dan pada akhirnya keberadaan pengungsi ini memengaruhi atau menghambat peningkatan kesejahteraan penduduk lokal. Mobilitas kesejahteraan penduduk lokal menjadi rendah dan peningkatan kesejahteraan mengalami perlambatan.

Ada dua faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan suatu rumah tangga menurut dua faktor berbeda, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar rumah tangga bersangkutan. Faktor dari dalam adalah kemauan, pendidikan, dan keterampilan, sedangkan faktor dari luar dimanifestasikan dalam bentuk dukungan dari pihak luar, terutama modal. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kesejahteraan lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam individu kepala rumah tangga yang bersangkutan, yaitu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya negatif seperti judi, mabuk, main perempuan, atau perebutan warisan antaranak. Selain itu, terdapat hal lain yang menurunkan kesejahteraan dan faktor ini sulit diatasi karena berada di luar kekuasaan rumah tangga, yaitu faktor semakin bertambahnya umur (penuaan) dan/atau sakit.

Kelompok laki-laki dalam FGD tangga kehidupan lebih melihat adanya kesenjangan di dalam komunitas dibandingkan dengan kelompok perempuan. Selain itu, jumlah tangga yang diidentifikasi oleh kelompok laki-laki menunjukkan jumlah anak tangga yang lebih

banyak sehingga identifikasi kesejahteraan juga semakin lebar. Hasil perhitungan *share mobility index* juga menghasilkan angka negatif untuk kelompok laki-laki. Hal ini berarti bahwa kelompok laki-laki dapat mengidentifikasi klasifikasi kesejahteraan masyarakat lebih mendalam.

Dengan adanya berbagai faktor yang memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas di RW 4 khususnya dan di Desa Noelbaki pada umumnya. Di antaranya adalah pemberian motivasi bagi komunitas melalui berbagai pelatihan, bantuan modal melalui berbagai program, dan penanganan masalah pengungsi di Desa Noelbaki secara menyeluruh.

Walaupun kombinasi ketiga hal tersebut merupakan cara yang sangat ideal bila dilakukan secara bersamaan, namun pemberian motivasi bagi komunitas merupakan hal yang utama untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengalaman di komunitas menunjukkan bahwa kemauan dan kegigihan untuk berusaha merupakan faktor paling penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Kemudian faktor-faktor ini harus didukung oleh faktor eksternal berupa bantuan berbagai program, khususnya bantuan modal. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga diperlukan penanganan pengungsi, antara lain dengan memindahkan pengungsi dari Desa Noelbaki ke tempat lain, mengingat keberadaan pengungsi di komunitas selama ini lebih banyak mengganggu daripada memberi manfaat.

Walaupun kegiatan pemindahan pengungsi keluar dari Desa Noelbaki telah dilakukan melalui berbagai program dan oleh berbagai lembaga sehingga terjadi penurunan jumlah pengungsi dari 17 ribuan dan kini tinggal tiga ribuan, namun warga tetap menginginkan seluruh pengungsi dipindahkan dari Desa Noelbaki ke tempat lain. Dengan demikian, warga berharap dapat segera meningkatkan kesejahteraan mereka. Berpindahnya pengungsi ini diharapkan akan mengakhiri saling curiga antara warga, sebab selama ini intensitas pencurian berbagai ternak, buah-buahan, sayur-sayuran, atau lainnya meningkat sejak kedatangan pengungsi, dan tidak jelas siapa yang melakukan, apakah oleh pengungsi atau warga lokal sendiri.

I. PENDAHULUAN

Jumlah penduduk miskin di Indonesia telah berkurang secara drastis dalam dua dekade menjelang 1996, yaitu dari 54,2 juta pada 1976 menjadi 22,5 juta pada 1996. Akan tetapi, adanya krisis ekonomi sejak pertengahan 1997, angka kemiskinan meningkat kembali. Krisis ekonomi tersebut telah menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dari 15% sebelum krisis (pertengahan 1997) menjadi 33% pada akhir 1998. Krisis ekonomi menyebabkan sekitar 36 juta penduduk Indonesia jatuh miskin (Suryahadi, et al, 2003: iii). Namun, enam tahun setelah krisis ekonomi berlalu, dampak krisis ekonomi mulai berkurang dan jumlah penduduk miskin menurun menjadi 17,4%.

Di Kabupaten Kupang, berdasarkan Suseda (Survei Sosial dan Ekonomi Daerah) yang dilakukan oleh BPS setempat pada 2002 diperoleh data bahwa dari 62.072 rumah tangga yang ada di Kabupaten Kupang terdapat 65,7% atau 44.622 rumah tangga miskin (BPS Kabupaten Kupang, 2002). Suseda tersebut menggunakan lima faktor untuk mengidentifikasi rumah tangga apakah termasuk miskin atau tidak, yaitu (a) tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan lapangan pekerjaannya; (b) pengelompokan rumah tangga atas dasar ketidakmampuan dari sudut ekonomi; (c) kepemilikan aset; (d) kondisi dan fasilitas rumah tinggal; dan (e) proporsi dari konsumsi membeli bahan makanan terhadap pengeluaran rumah tangga keseluruhan dalam satu bulan.¹

Krisis ekonomi juga ditandai dengan munculnya berbagai konflik di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa konflik berskala besar yang muncul di antaranya adalah konflik bernuansa agama di Maluku, konflik etnis di Kalimantan, dan sebagian di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk juga konflik antara penduduk asli, pengungsi, gerakan prointegrasi dan prokemerdekaan, dan konflik yang muncul dari gerakan separatis seperti di Aceh. Selain konflik berskala besar, juga menyebar konflik berskala kecil lainnya dengan berbagai macam sebab di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Di Provinsi NTT pada 2005 masih terdapat 24.524 KK atau 104.436 jiwa pengungsi yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain di Kabupaten Kupang terdapat 2.553 KK atau 11.360 jiwa (Tabel 1.1) yang tersebar di berbagai desa seperti di Desa Tuapukan, Noelbaki, dan Naibonat. Keberadaan pengungsi di desa-desa ini telah memengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Pengaruh tersebut mencakup bidang sosial, ekonomi, keamanan, kesehatan, maupun lingkungan. Di Desa Noelbaki, keberadaan pengungsi ini telah menimbulkan konflik tidak saja antara pengungsi dengan penduduk lokal, bahkan antara pengungsi satu dengan pengungsi lainnya yang ditempatkan di berbagai tempat penampungan (kamp) pengungsi. Konflik-konflik tersebut bermula dengan kedatangan 17 ribuan pengungsi di Desa Noelbaki pada 1999. Jumlah pengungsi ini terlalu besar dibandingkan dengan jumlah penduduk lokal yang hanya lima ribu jiwa pada saat itu. Kedatangan pengungsi ke Desa Noelbaki ini telah menimbulkan interaksi sosial antara pengungsi dengan penduduk lokal, yang di kemudian hari timbul ketegangan-ketegangan sosial. Ketegangan sosial ini terus berlangsung hingga saat ini.

¹BPS Kabupaten Kupang, *Profil Rumah tangga Miskin Kabupaten Kupang 2002*, halaman 4-6.

Tabel 1.1. Jumlah Pengungsi di NTT, 2005

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kota Kupang	1.141	---	---	---
2	Rote Ndao	---	---	---	---
3	<i>Kupang</i>	2.553	---	---	11.360
4	<i>Timor Tengah Selatan</i>	632	1.429	1.383	2.812
5	Timor Tengah Utara	2.772	---	---	11.176
6	<i>Belu</i>	15.274	34.150	36.303	70.453
7	Alor	918	---	---	3.501
8	Lembata	61	116	92	208
9	Flores Timur	---	---	---	---
10	Sikka	386	---	---	1.755
11	Ende	---	---	---	---
12	Ngada	339	855	702	1.577
13	Manggarai	---	---	---	---
14	Manggarai Barat	138	---	---	521
15	Sumba Timur	154	233	180	413
16	Sumba Barat	156	338	322	660
	Jumlah	24.524			104.436

Keterangan: Data masih bersifat tentatif, karena beberapa kabupaten belum melengkapi data sesuai format yang telah ditetapkan. Nama kabupaten yang dicetak miring adalah lokasi penelitian Keluar dari Kemiskinan di Wilayah Timor Barat.

Sumber: Bidang Sosial, Sekretariat Daerah Provinsi NTT, 2006.

Dalam kondisi di mana tingkat kemiskinan cenderung menurun dan munculnya berbagai konflik kekerasan, muncul beberapa pertanyaan mendasar. Siapakah mereka yang telah keluar dari kemiskinan? Bagaimana dan mengapa mereka bisa keluar dari kemiskinan? Di sisi lain, mengapa sebagian orang atau rumah tangga masih terjebak dalam kemiskinan? Lembaga Penelitian SMERU mencoba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga dapat lebih memahami masalah kemiskinan di Indonesia, dan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk membantu orang miskin keluar secara permanen dari kemiskinan.

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi keluarnya seseorang dari kemiskinan, baik faktor struktural/komunitas, faktor individu, maupun interaksi dari kedua faktor tersebut. Studi Keluar dari Kemiskinan (*Moving Out of Poverty*) di Kabupaten Kupang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari studi Keluar dari Kemiskinan di Timor Barat ini (*Moving Out of Poverty in West Timor*) mencoba menggali berbagai aspek, di antaranya aspek fisik, sosial, politik, institusional, dan ekonomi yang menghambat atau memfasilitasi orang untuk keluar dari kemiskinan di Kabupaten Kupang, khususnya pada komunitas terpilih. Hasil studi ini akan melengkapi dan berguna bagi pengambil kebijakan di tingkat makro dan sangat terkait dengan desain dan monitoring dari strategi penanggulangan kemiskinan yang sedang dilaksanakan di Indonesia. Studi ini juga mencakup sudut pandang pengambil kebijakan serta masyarakat lokal terhadap peristiwa-peristiwa dan kebijakan yang berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan selama satu dekade terakhir ini.

Studi yang dilakukan di Kabupaten Kupang ini mengumpulkan informasi mengenai bagaimana dan mengapa sebagian orang atau rumah tangga dapat keluar dari kemiskinan sementara sebagian lainnya tetap terjerat dalam kemiskinan yang kronis. Studi ini juga mencoba memahami, dari sudut pandang lokal, faktor-faktor apa yang mendorong keluarnya orang secara permanen dari kemiskinan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor struktural/komunitas, dan faktor-faktor individu. Studi ini akan melihat perubahan dinamis selama 10 tahun dari perspektif laki-laki dan perempuan yang berhasil keluar dari kemiskinan.

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini mencakup:

1. Mengapa dan bagaimana sekelompok orang dalam masyarakat dapat keluar dari kemiskinan sementara kelompok lain jatuh dan terjerat dalam kemiskinan?
2. Bagaimana berbagai konteks yang disebutkan di bawah ini memengaruhi upaya seseorang untuk keluar dari kemiskinan:
 - konteks ekonomi seperti tingkat dan kualitas pertumbuhan;
 - konteks politik seperti kualitas tata pemerintahan lokal dan dinamika politik lokal;
 - konteks sosial budaya seperti kesukuan, politik identitas, dan latar belakang sejarah wilayah yang bersangkutan.
3. Bagaimana konflik berpengaruh pada mobilitas sosial, baik pada tingkat rumah tangga maupun pada tingkat komunitas?
4. Bagaimana kemampuan perorangan dan kolektif dalam struktur kelembagaan sosial dan politis yang ada bisa memunculkan mobilitas yang berbeda?

Pengumpulan data dan informasi dalam studi ini dilakukan dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah (*focused groups discussion*) dengan informan kunci dan masyarakat, baik kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban tentang *mengapa* dan *bagaimana* seseorang bisa keluar dari kemiskinan dan menggali apakah faktor-faktor yang teridentifikasi tersebut bersifat multidimensional. Sementara instrumen yang digunakan dalam metode kuantitatif adalah pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dalam kuesioner yang menghasilkan data mengenai tingkat keragaman pengalaman seseorang atau rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki hubungan yang kuat dengan usaha untuk keluar dari kemiskinan.

Lokasi penelitian Keluar dari Kemiskinan di Kabupaten Kupang adalah Desa Noelbaki yang berada di Kecamatan Kupang Tengah. Sedangkan komunitas yang dipilih adalah komunitas di RW 4, Dusun Kiuteta. Kegiatan wawancara dan diskusi kelompok terarah dilakukan oleh lima peneliti, satu peneliti SMERU dan empat peneliti regional dari Kupang.

II. LOKASI PENELITIAN DAN KONTEKS LOKAL

A. Gambaran Umum Kabupaten Kupang

Kabupaten Kupang merupakan satu dari 16 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi NTT merupakan provinsi yang terdiri atas banyak pulau, yaitu 566 pulau besar dan kecil dengan luas daratan 47,3 ribu km² atau 2,5% dari luas Indonesia, dan wilayah laut mencapai 200 ribu km² ditambah dengan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Pada 2004/2005, dari 566 pulau yang ada di Provinsi NTT ini hanya 42 pulau yang dihuni, termasuk enam pulau besar (yang luasnya di atas 1.000 km²), yaitu Timor (Barat), Flores, Sumba, Alor, Lomblen, dan Rote.

Kabupaten Kupang yang terletak di Pulau Timor (Barat) memiliki prasarana dan sarana perhubungan yang masih sangat terbatas. Akses perhubungan ke dan dari ibukota Kabupaten Kupang, yang juga menjadi bagian dari ibukota provinsi, yaitu Kota Kupang, relatif mudah karena adanya pelabuhan laut yang cukup besar dan lapangan udara dengan penerbangan setiap hari ke beberapa kota di Indonesia. Akses jalan yang mudah dilalui adalah wilayah-wilayah yang berada di sekitar “jalan lintas Timor” yang menghubungkan Kota Kupang hingga Kota Atambua di Kabupaten Belu, sedangkan akses perhubungan ke beberapa daerah di dalam kabupaten ini masih terbatas. Beberapa daerah yang sulit dijangkau dari ibukota kabupaten adalah wilayah-wilayah yang tidak dilalui jalur ini, dan khususnya lagi yang berada di luar Pulau Timor dan apalagi pada musim hujan.

Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Penduduk di NTT, Kabupaten Kupang, dan Kecamatan Kupang Tengah, 2004

Wilayah dan Penduduk	Provinsi NTT	Kabupaten Kupang	Kecamatan Kupang Tengah
Luas wilayah (km ²)	47.349,9	5.898,2	198,3
Penduduk (2004)	4.188.774	337.065	36.344
Tingkat kepadatan penduduk (per km ²)	88,7	56,0	180,0
Jumlah kabupaten/kota	16	--	--
Jumlah kecamatan	197	22	--
Jumlah desa	2.585	186	10

Sumber: BPS NTT (2004/2005), BPS Kabupaten Kupang (2004).

Perkembangan kegiatan ekonomi di NTT masih terbatas dan bertumpu pada perkembangan ekonomi di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Kedua wilayah ini menjadi tujuan masyarakat setempat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun mencari pekerjaan. Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah lebih tingginya produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dibandingkan dengan rata-rata PDRB di Provinsi NTT pada umumnya. Rata-rata pendapatan per kapita di NTT pada 2003 hanya sekitar Rp812.220, di Kabupaten Kupang Rp887.523 dan di Kota Kupang Rp2.073.429.²

²Data PDRB Provinsi NTT menurut Kabupaten/Kota 2000-2003 dalam ‘NTT Dalam Angka, 2004/2005’.

Secara geografis wilayah Kabupaten Kupang mencakup daratan Pulau Timor dan 27 pulau, delapan pulau di antaranya belum diberi nama. Sedangkan yang dihuni penduduk baru lima pulau yaitu Pulau Timor, Pulau Sabu, Pulau Raijua, Pulau Semau, dan Pulau Kera. Secara administratif Kabupaten Kupang terdiri atas 22 kecamatan dan 165 desa dengan luas wilayah daratan 5.898,18 km². Pada 2004 jumlah penduduk Kabupaten Kupang berjumlah 337.065 jiwa, dengan kepadatan 56 jiwa per km².

Kecamatan Kupang Tengah merupakan satu dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang, secara administratif dibagi menjadi sembilan desa dan satu kelurahan, dan beribukota di Kelurahan Tarus. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 198,25 km² serta jumlah penduduknya 36.344 jiwa. Salah satu indikator kemajuan suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya. Penduduk Kabupaten Kupang Tengah (2004) yang berumur lima tahun ke atas, dari 33.936 ternyata sebagian besar (12.495 atau 36,8%) tidak atau belum pernah sekolah, 9.615 atau 28,3% tamat SD, 3.427 atau 10,1% tamat SLTP, 4.759 atau 14,0% tamat SLTA, 3.145 atau 9,3% tamat diploma, dan 495 atau 1,5% sarjana.

B. Gambaran Umum Desa dan Komunitas

Keadaan geografis, mata pencaharian, dan sosial

Desa Noelbaki merupakan satu dari 10 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Kupang Tengah. Sebagian besar wilayahnya merupakan tanah datar dengan luas wilayah 17,70 km² atau 8,07% dari luas wilayah Kecamatan Kupang Tengah. Desa Noelbaki terdiri dari lima dusun,³ 19 RW, dan 46 RT. Desa yang terletak 25 km dari Kota Kupang atau ibukota kabupaten ini memiliki jumlah penduduk 1.303 KK atau 5.501 jiwa. Sebagai desa yang dilalui "jalur lintas Timor" dan berdampingan dengan ibukota kecamatan, Desa Noelbaki menjadi wilayah terbuka bagi masyarakat berbagai daerah. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila masyarakat Noelbaki terdiri atas berbagai suku/etnis yang jumlahnya masing-masing hampir berimbang, yaitu Suku Timor, Rote, Flores, dan Sabu, bahkan ada juga Suku Jawa dan Bugis. Mayoritas penduduknya beragama Protestan (60%) dan Katholik (30%). Jadi tidak mengherankan jika di desa ini banyak ditemui organisasi yang bersifat kesukuan (etnis) dan keagamaan.

Dilihat dari mata pencahariannya, mayoritas penduduk Desa Noelbaki bekerja sebagai petani, baik petani pemilik maupun penggarap. Selebihnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil, wiraswasta/pengusaha/pedagang, peternak (babi/sapi/ayam), nelayan, supir bus atau angkutan kota, dan buruh. Sejak lama desa ini menjadi pusat pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang dengan adanya Balai Benih Induk Pertanian (BBIP), Balai Latihan Penyuluh Pertanian (BLPP), dan Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) di desa ini. Pada umumnya masyarakat memiliki lebih dari satu pekerjaan, yaitu pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan. Sebagai contoh adalah warga masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri, pengusaha, pedagang umumnya juga bekerja sebagai petani.

³Yaitu Dusun Air Sagu, Kiuteta, Kuannoah, Dendeng, dan Oehau.

Geliat ekonomi di Desa Noelbaki pernah ditandai dengan keberadaan dua pabrik yang menyerap tenaga kerja penduduk lokal, yaitu pabrik penyamakan kulit sapi (1980-1982) dan pabrik rumput laut (1999-2002).⁴ Kedua pabrik ini akhirnya ditutup karena mendapat protes masyarakat setempat yang merasakan kedua pabrik tersebut menimbulkan limbah dan polusi dari bahan-bahan kimia yang tercermin dari munculnya bau yang menyengat dalam radius ratusan meter dari lokasi pabrik tersebut ke rumah-rumah warga.

Komunitas yang dipilih dalam studi “Keluar dari Kemiskinan” di Kabupaten Kupang adalah RW 4 di Dusun Kiuteta, Desa Noelbaki. RW 4 terdiri dari 100 KK dengan jumlah penduduk sekitar 600-an jiwa, dan sebagian besar beragama Protestan (48%) dan Katholik (48%), serta lainnya beragama Islam. Sebagaimana di tingkat desa, di RW 4 juga sudah tersedia berbagai infrastruktur dasar, seperti telah terhubungnya jaringan listrik ke rumah-rumah penduduk, tersedianya air minum bersih (PAM), pasar, wartel, kapel (stasi), dan terminal yang terletak di perbatasan dengan RW 5. Saat ini baik di desa maupun di RW 4 tidak terdapat perusahaan atau pabrik, namun ada beberapa anggota masyarakat yang bekerja pada orang lain sebagai buruh seperti pada sektor pertanian atau bangunan. Upah rata-rata buruh kasar berkisar antara Rp15.000 hingga Rp20.000 per hari, tidak dibedakan antara buruh laki-laki dan perempuan. Besaran upah buruh ini secara nominal lebih besar tiga sampai empat kali lipat dibandingkan dengan upah buruh pada 10 tahun lalu, yaitu Rp5.000 per hari.

Alasan pemilihan lokasi

Pemilihan lokasi RW 4 sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di RW ini terdapat tempat penampungan pengungsi yang berada di terminal dan pasar. Hal ini memungkinkan terjadi interaksi sosial antara penduduk lokal dan para pengungsi, yang dalam perjalanan waktu menimbulkan berbagai dampak di antara kedua komunitas, baik dampak sosial, ekonomi, lingkungan, maupun dampak lainnya. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif.

**Tabel 2.2. Luas Wilayah dan Penduduk
Desa Noelbaki, Dusun Kiuteta, dan RW 4 Tahun 2004**

Wilayah dan Penduduk	Desa Noelbaki	Dusun Kiuteta	RW4
Luas wilayah (km ²)	17,7	–	–
Penduduk (2004)	6.733	988	600
Tingkat kepadatan penduduk (per km ²)	380	–	–
Jumlah dusun	5	–	–
Jumlah RW	19	4	–

Sumber: BPS Kabupaten Kupang, *Kecamatan Kupang Tengah Dalam Angka 2004*, Laporan Kepala Desa Noelbaki pada Rapat Lengkap Perangkat Daerah, 30 November 2005, dan Profil Komunitas.

⁴Pabrik penyamakan kulit sapi dibangun di Dusun Air Sagu pada 1974 dan mulai beroperasi pada awal 1980-an. Pabrik ini menyerap 10 tenaga kerja lokal dengan upah Rp1-2 ribu per orang per hari. Sedangkan pabrik rumput laut didirikan di Dusun Dendeng pada 1999. Pabrik ini menyerap bahan baku dari Pulau Sabu dan Rote, serta menyerap 20 tenaga kerja lokal dengan upah Rp2.500 per orang per hari untuk penyortir. Hasil produksi dari pabrik ini diekspor ke Inggris dan Singapura.

C. Kondisi Kemiskinan di Wilayah Penelitian

Berdasarkan “Survei Potensi Ekonomi dan Suseda 2002” yang dilakukan BPS Kabupaten Kupang, diperoleh data bahwa dari 67.897 rumah tangga yang ada di Kabupaten Kupang terdapat 65,7% atau 44.622 rumah tangga yang tergolong miskin. Sedangkan di Kecamatan Kupang Tengah terdapat 68,3% rumah tangga miskin (Tabel 2.3). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Kupang Tengah menempati urutan keempat secara absolut atau ketujuh secara persentase sebagai kecamatan termiskin dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang.

Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, dan Desa Noelbaki, 2002

	Kabupaten Kupang	Kecamatan Kupang Tengah	Desa Noelbaki
Jumlah rumah tangga	67.897	6.976	1.050
Jumlah rumah tangga miskin	44.622	4.765	677
Persentase rumah tangga miskin	65,7%	68,3%	64,5%

Sumber: BPS Kabupaten Kupang, *Profil Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kupang 2002*.

Tabel 2.3. juga menunjukkan bahwa di Desa Noelbaki dari 1.050 rumah tangga yang ada terdapat 64,48% atau 677 rumah tangga yang termasuk rumah tangga miskin, yang merupakan urutan kedua secara absolut atau ketujuh secara persentase sebagai desa termiskin dari 12 desa yang ada di Kecamatan Kupang Tengah. Tingginya persentase rumah tangga miskin di Desa Noelbaki ini merupakan hal menarik untuk dipelajari lebih jauh, mengingat desa ini terletak di jalur perekonomian (jalan lintas Timor) dan lokasinya bersebelahan dengan kelurahan yang menjadi ibukota kecamatan. Apakah tingginya angka kemiskinan di Desa Noelbaki ini disebabkan oleh faktor-faktor internal atautkah faktor eksternal? Studi ini mencoba mencari jawaban tentang hal ini.

III. MOBILITAS SOSIAL-EKONOMI PADA TINGKAT-TINGKAT YANG BERBEDA: PERSPEKTIF DARI BAWAH

A. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Tingkat Komunitas

Komunitas dalam studi Keluar dari Kemiskinan di Kabupaten Kupang adalah komunitas RW 4 yang berada di Dusun Kiuteta, Desa Noelbaki. Jumlah anggota komunitas di RW 4 ini terdiri dari 100 KK dengan jumlah penduduk sekitar 600 jiwa. Sebagaimana kondisi di tingkat desa, penduduk RW 4 inipun beragam dari berbagai suku, seperti suku Timor, Flores, Rote, Sabu, serta sedikit Bugis dan Jawa. Sedangkan pekerjaan masyarakat pada umumnya adalah petani, pedagang, dan sebagian pegawai negeri sipil. Di RW 4 ini, saat ini (2006) masih terdapat dua ribu lebih pengungsi eks-Timor Timur, yang pada awal kedatangannya (1999) mencapai 17 ribuan pengungsi. Para pengungsi menempati lokasi terminal angkutan kota (bemo) dan lokasi pasar desa yang sebagian besar wilayahnya berada di wilayah RW 4, dan selebihnya berada di RW 5.

Pada awal kedatangannya, sebagian pengungsi juga menempati areal perkantoran Dinas Pertanian seperti BBIP. Keberadaan para pengungsi di wilayah ini pada awalnya berjalan damai, namun dalam perjalanan waktu telah menimbulkan permasalahan dengan kalangan warga lokal. Pergesekan antara penduduk lokal dengan para pengungsi ini dimungkinkan terjadi karena di antara kedua komunitas tersebut memiliki perbedaan budaya, agama, dan kebiasaan, serta sering berinteraksi dalam wilayah yang sama. Persentuhan antarbudaya yang berbeda yang terjadi sejak 1999 sampai kini secara dinamis dalam proses tawar-menawar bisa mewujudkan perubahan tata nilai yang tampil sekedar sebagai pergeseran (*shift*) antarnilai, atau persengketaan (*conflict*) antarnilai, atau bahkan dapat berupa benturan (*clash*) antarnilai yang dimiliki penduduk lokal dengan para pengungsi.⁵ Perubahan-perubahan ini bisa berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun aspek yang lain.

Identifikasi tangga kehidupan

Dari identifikasi tangga kehidupan dalam diskusi kelompok terarah (FGD), baik di tingkat desa maupun komunitas, tidak ada perbedaan jumlah anak tangga, baik pada FGD tangga kehidupan kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. Pada FGD tangga kehidupan kelompok laki-laki, jumlah anak tangga saat ini (terdapat lima anak tangga)⁶ lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak tangga 10 tahun lalu (empat anak tangga).⁷ Penambahan anak tangga ini disebabkan munculnya tangga baru, yaitu “cukup” yang merupakan gabungan antara anak tangga *pas-pas* dan *pas* 10 tahun lalu yang

⁵Endang Poerwanti, *Pemahaman Psikologi Masyarakat Indonesia Sebagai Upaya Menjembatani Silang Budaya* dalam <http://www.ialf.edu/kipbipa/papers>.

⁶Kelima anak tangga tersebut adalah (diurutkan dari yang paling bawah/miskin): *susanae* (susah/miskin), *pas-pas*, *pas*, *cukup* dan *amuit* (kaya).

⁷Keempat anak tangga tersebut adalah (diurutkan dari yang paling bawah/miskin): *susanae* atau susah/ miskin, *pas-pas*, *pas*, dan *amuit* (kaya). Namun kemudian ternyata dalam identifikasi rumah tangga yang ada di komunitas hanya ada tiga anak tangga pada 10 tahun yang lalu, yaitu tiga anak tangga yang disebutkan di awal.

mengalami kenaikan kesejahteraan dengan tangga *amuut* 10 tahun lalu yang mengalami penurunan kesejahteraan pada tahun-tahun berikutnya. Menurut hasil identifikasi rumah tangga dalam FGD, tangga kehidupan kelompok laki-laki 10 tahun yang lalu terdapat 6% rumah tangga yang berada pada tangga *susanae*, 61% pada *pas-pas*, dan 23% pada *pas*.⁸ Sedangkan pada saat ini terdapat 1% rumah tangga yang tergolong rumah tangga *susanae*, 58% *pas-pas*, 25% *pas*, 13% *cukup*, dan hanya 3% yang *amuut*.⁹

Sedangkan menurut FGD tangga kehidupan kelompok perempuan, diperoleh jumlah tangga saat ini sama dengan jumlah tangga pada 10 tahun yang lalu, yaitu tiga anak tangga.¹⁰ Jumlah tangga ini sama untuk masyarakat di tingkat desa dan di tingkat komunitas. Menurut kelompok perempuan, pada 10 tahun lalu terdapat 50% rumah tangga yang *amamuut*, 23% *sederhana*, dan 27% *amuut*.¹¹ Sedangkan pada saat ini terdapat 33% *amamuut*, 29% *sederhana*, dan 38% *amuut*.¹²

Ciri-ciri masing-masing tangga dan identifikasi rumah tangganya dapat dilihat pada Lampiran 3a-d.

Pengaruh pengungsi

Sejak kedatangan pengungsi pada 1999, kondisi masyarakat RW 4 sedikit banyak dipengaruhi oleh keberadaan pengungsi di wilayah tersebut. Pengaruh tersebut tidak hanya pada aspek ekonomi saja, tetapi juga menyangkut keamanan, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan identifikasi yang diperoleh pada FGD tangga kehidupan, pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat lambat dalam sepuluh tahun terakhir ini, walau ada beberapa (sebagian) anggota masyarakat yang mengalami peningkatan, yaitu umumnya pegawai negeri yang bekerja pada institusi pemerintah yang ada di desa ini misalnya institusi Balai Latihan Penyuluh Pertanian (BLPP). Namun, masyarakat yang mata pencahariannya terfokus pada berdagang dan/atau bertani sulit mengalami kenaikan kesejahteraan ekonomi. Dari hasil perhitungan *mobility index*, diperoleh angka yang sangat kecil, yaitu 0,33 untuk FGD tangga kehidupan kelompok laki-laki dan 0,34 untuk FGD tangga kehidupan kelompok perempuan (lihat Tabel 3.1.). Kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada komunitas ini disebabkan antara lain oleh keberadaan para pengungsi di Desa Noelbaki yang juga melakukan aktivitas di bidang ekonomi yang sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan bersedia dibayar/diupah atau memberikan harga yang lebih murah. Misalnya, bila seorang pengungsi bekerja sebagai buruh, maka pengungsi tersebut mau dibayar atau diupah lebih murah dibandingkan

⁸Angka identifikasi ini berbeda dengan perkiraan peserta FGD yang memperkirakan bahwa 15% rumah tangga ada pada tangga *melarat*, 60% *pas-pas*, 20% *pas*, dan hanya 5% yang *amuut*.

⁹Angka identifikasi ini juga berbeda dengan perkiraan peserta FGD yang memperkirakan rumah tangga-rumah tangga di komunitas bahwa 15% *melarat*, 10% *pas-pas*, 20% *pas*, 50% *cukup*, dan 5% *amuut*.

¹⁰Ketiga anak tangga tersebut adalah (diurutkan dari yang paling bawah): kurang mampu atau *amamuut*, sederhana, dan bermampu atau *amuut*.

¹¹Angka ini mendekati perkiraan peserta FGD yang menyebutkan bahwa 55% rumah tangga *amamuut*, 15% *sederhana*, dan 30% *amuut*.

¹²Hal ini berbeda jauh dengan perkiraan FGD yang menyebutkan bahwa 5% *amamuut*, 25% *sederhana*, dan 70% *amuut*.

dengan upah rata-rata penduduk lokal. Demikian juga bila para pengungsi menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar, sayur-sayuran, atau buah-buahan, maka mereka menjual dengan harga yang lebih murah dari biasanya atau harga yang ditawarkan penduduk lokal. Kondisi seperti ini kemungkinan dapat menurunkan pendapatan penduduk lokal, yang dalam jangka panjang memungkinkan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Selain adanya rivalitas dalam berusaha antara penduduk lokal dengan para pengungsi, komunitas lokal juga dihadapkan pada persoalan modal sebagai penghambat utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. “Dia (sambil menunjuk ke peserta FGD lain yang memiliki jaminan untuk meminjam kredit di bank) berani dan mau ke bank minta kredit untuk kembangkan usaha sehingga dapat berubah” (Laki-laki, 73 tahun); “di samping itu untuk pinjam di bank syarat-syaratnya banyak, tidak mendukung masyarakat kecil” (Laki-laki, 50 tahun).

Indeks kondisi kesejahteraan

Dengan kondisi seperti dijelaskan di atas, peserta FGD tangga kehidupan kelompok laki-laki berpendapat bahwa masyarakat atau komunitas RW 4 lebih banyak yang terpaku (mandek) kondisi (kesejahteraan) ekonominya sebagaimana keadaan pada tahun-tahun sebelumnya selama 10 tahun terakhir, khususnya sejak kedatangan pengungsi pada 1999. Mobilitas banyak terjadi pada kelompok kaya, yaitu 0,48 dibanding pada kelompok miskin (0,22). (Lihat Tabel 3.1)

Perhitungan indeks berdasarkan identifikasi peserta FGD tangga kehidupan kelompok perempuan terjadi sebaliknya; indeks mobilitas pada kelompok kaya hanya 0,22 dan pada kelompok miskin 0,36. Dengan angka indeks yang berkebalikan ini, indeks kesejahteraan terbagi (*share prosperity index*) bertanda negatif untuk FGD tangga kehidupan kelompok laki-laki dan bertanda positif untuk FGD tangga kehidupan kelompok perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam komunitas tersebut terjadi kesenjangan yang lebih lebar menurut FGD tangga kehidupan kelompok laki-laki dibandingkan dengan FGD tangga kehidupan kelompok perempuan. Kesenjangan yang melebar ini ditandai dengan makin banyaknya anak tangga yang bisa diidentifikasi peserta FGD tangga kehidupan kelompok laki-laki, dari empat anak tangga pada 10 tahun yang lalu menjadi lima anak tangga pada saat ini. Menurut peserta FGD tangga kehidupan kelompok laki-laki, melebarnya kesenjangan ini disebabkan antara lain makin bertambahnya jumlah penduduk, masuknya rumah tangga-rumah tangga baru sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pengusaha ke desa ini, serta dijualnya harta warisan. “Ada perubahan, karena jumlah penduduk bertambah” (Laki-laki, 36 tahun); “*amuit* bertambah karena masuknya pegawai negeri sipil (PNS) dan pengusaha (Laki-laki, 50 tahun); ... *amuit* dulu dan sekarang berbeda karena banyak harta warisan telah dijual” (Laki-laki, 50 tahun); “perubahan kebutuhan, dulu sedikit dan sekarang lebih besar” (Laki-laki, 36 tahun).

Menurut peserta FGD tangga kehidupan kelompok perempuan, masyarakat yang miskin (*amamuit*) dulu masih sedikit sedangkan yang kaya (*amuit*) masih banyak. “*amamuit* dulu di desa lebih sedikit dari sekarang” (Perempuan, 66); “*kalau amuit di Desa Noelbaki dulu itu lebih banyak dari sekarang karena dulu hidup masih susah*” (Perempuan, 59).

Kondisi ekonomi atau kesejahteraan masyarakat dengan laju pertumbuhan yang lambat ini juga ditunjukkan dengan kecilnya proporsi jumlah rumah tangga yang mengalami penurunan kesejahteraan. Hal ini terlihat dari angka *falling index* yang hanya 0,05 untuk FGD tangga kehidupan kelompok perempuan dan bahkan 0,03 untuk FGD tangga kehidupan kelompok laki-laki.

Tabel 3.1. Indeks Kondisi Kesejahteraan
Hasil Identifikasi FGD Tangga Kehidupan Kelompok Laki-Laki dan Perempuan¹³

Indeks Kondisi Kesejahteraan	Menurut FGD Tangga Kehidupan	
	Kelompok Laki-laki	Kelompok Perempuan
Indeks kesejahteraan	0,30	0,29
Indeks kesejahteraan neto	0,28	0,23
Indeks mobilitas	0,33	0,34
Indeks keluar dari kemiskinan	0,15	0,36
Indeks kesejahteraan terbagi	-0,26	0,14
Indeks jatuh miskin	0,03	0,05
Indeks mobilitas masyarakat miskin	0,22	0,36
Indeks mobilitas masyarakat kaya	0,48	0,22

B. Tingkat Komunitas

Faktor yang membantu

Hasil kedua FGD tangga kehidupan, baik pada kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan menunjukkan pandangan yang sama dalam menyikapi berbagai faktor yang dapat membantu kesejahteraan komunitas. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam faktor-faktor yang berasal dari dalam dan dari luar komunitas. Faktor dari dalam komunitas antara lain menyangkut kemauan, kemampuan berpikir untuk berusaha, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari luar komunitas yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas tersebut antara lain adalah adanya bantuan modal dari pihak luar, adanya bantuan jaringan pemasaran, adanya kepemilikan lahan, tidak adanya hama bagi pertanian, adanya program dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) di komunitas tersebut, dan adanya pelatihan yang ditujukan bagi komunitas, khususnya para petani. Karena sebagian besar komunitas bekerja sebagai petani, faktor kepemilikan lahan dianggap memiliki peranan yang sangat penting. Walau ada kemauan tetapi kalau tidak memiliki lahan maka tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, faktor-faktor lain walau dianggap penting namun tidak sepenting kepemilikan lahan. Misalnya, program dari lembaga swadaya masyarakat dinilai lebih banyak teorinya daripada praktik. Sedangkan pelatihan bagi petani dinilai masih sangat sedikit atau minim. Hal-hal inilah yang menyebabkan peserta FGD menilai faktor dari dalam lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dibandingkan dengan faktor-faktor dari luar.

¹³Perhitungan berbagai indeks kedua kelompok ini ada pada Lampiran 4a dan 4b.

Apabila dari berbagai faktor di atas dipilih dua faktor paling penting yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas, peserta FGD berpendapat bahwa kesejahteraan komunitas dapat ditingkatkan dengan kombinasi usaha dari dalam dan adanya bantuan dari luar. Namun faktor kemauan, yaitu usaha dari dalam, merupakan faktor kunci yang dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas. Kedua faktor tersebut-baik yang dari dalam maupun dari luar-harus berjalan secara bersama-sama atau bersinergi, dalam arti bahwa pada saat ada kemauan untuk berusaha sekaligus juga ada bantuan modal. Kelompok laki-laki menyebutnya “Kemauan dan dukungan modal”, sedangkan kelompok perempuan menyebutnya “kemauan dan kerja keras”. Berikut ini beberapa jawaban mereka. “Modal dan kemauan” (Laki-laki, 62 tahun); “Modal, kemauan, dan pemasaran” (Laki-laki, 50 tahun); “pemasaran” (Laki-laki, 40 tahun). “Menurut saya, ada kemauan baru bisa bekerja keras dan kita harus membiasakan diri tidak bermental gampang” (Perempuan, 59 tahun); “... kemauan dan kerja keras” (Perempuan, 26 tahun); “Dari diri sendiri yaitu kemauan dan kerja keras” (Perempuan, 25 tahun).

Faktor penghambat

Di samping berbagai faktor yang mendorong peningkatan kesejahteraan, terdapat pula berbagai faktor yang menghambatnya. Faktor-faktor yang menghambat peningkatan kesejahteraan komunitas lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang sulit dikendalikan oleh komunitas tersebut, sebut saja faktor dari luar, seperti harga komoditas pertanian (misalnya harga padi dan sayur) yang mengalami penurunan, kurangnya informasi pasar, tidak adanya bantuan modal dari pihak luar, dampak lanjutan dari kebijakan kenaikan harga BBM (BBM), keadaan keamanan lingkungan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat faktor lain yang berperan menghambat peningkatan kesejahteraan, misalnya pencurian (ternak dan buah-buahan), persaingan harga (jual) kebutuhan sehari-hari antara yang dijual penduduk lokal dengan pengunjung, adanya budaya kumpul-kumpul keluarga baik pada saat pernikahan maupun kematian yang memerlukan (iuran) uang yang tidak sedikit.

Namun demikian, yang paling utama menjadi hambatan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah tidak adanya modal serta fasilitas air dan listrik. Adanya modal yang disertai dengan kemauan akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Demikian juga adanya air sangat membantu kehidupan komunitas, misalnya untuk mengairi tanaman padi dan sayur. Sedangkan fasilitas listrik, khususnya untuk penerangan jalan umum, akan mengurangi dampak negatif seperti pencurian. “Modal dan informasi pasar” (Laki-laki, 40 tahun); “modal, kesadaran, dan uang” (Laki-laki, 36 tahun); “pertama modal atau uang dan kedua kesehatan” (Laki-laki, 73 tahun); “pertama modal dan kesadaran, dan kedua teknologi pertanian” (Laki-laki, 50 tahun). Pendapat lain adalah “saya rasa air yang utama, karena masyarakat desa butuh air untuk hidup dan tanam. Selain itu, listrik juga punya pengaruh karena kalau tidak ada listrik tidak aman sehingga terjadi pencurian hasil” (Perempuan, 59 tahun); “air dan sarana produksi” (Perempuan, 30 tahun).

C. Tingkat Rumah Tangga/Individu

Faktor pendorong

Berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan mobilitas di tingkat rumah tangga adalah hal-hal atau sikap positif yang dimiliki atau dikerjakan oleh individu seperti bekerja keras, komunikasi yang baik antarsesama, membina hubungan baik, memiliki kemauan, memiliki pendidikan yang baik, memiliki keterampilan yang diperoleh dari kursus maupun pelatihan, dan lain sebagainya. Selain itu, faktor hasil kerja keras, berusaha keras, ada kemauan, giat berusaha dan bahkan memiliki usaha tambahan, serta banyak berdoa sangat membantu peningkatan mobilitas. Sedangkan dua hal paling penting yang menyebabkan suatu rumah tangga bisa naik beberapa tangga adalah faktor pendidikan dan bekerja keras. "... satu-satunya faktor untuk naik lompat hanyalah pendidikan" (Laki-laki, 40 tahun). Namun demikian, untuk bisa naik ini, rumah tangga tersebut memerlukan dorongan dari luar dirinya, seperti adanya bantuan program pemerintah di bidang pertanian, adanya bantuan teknologi, adanya bantuan modal dan manajemen. "Faktor-faktor pendukung adalah teknologi, modal, dan manajemen. Teknologi penting dan dibutuhkan karena mayoritas di desa ini adalah petani" (Laki-laki, 36 tahun); "biar kita kerja keras tapi kalau tidak pernah berdoa juga percuma, rejeki lari...." (Perempuan, 32 tahun).

Namun demikian ada beberapa rumah tangga yang mengalami kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraannya karena berbagai hal. Hal-hal ini umumnya di luar kekuasaan rumah tangga tersebut, misalnya ketiadaan modal, usia yang semakin tua, fluktuasi harga dari hasil produksi pertanian, dan lain sebagainya. "Mau berusaha tetapi modal tidak ada" (Laki-laki, 40 tahun); "faktor usia tidak produktif lagi, pasrah" (Laki-laki, 62 tahun); "harga naik turun" (Laki-laki, 40 tahun).

Sedangkan bila dilihat dari segi pendidikan kepala keluarga, rumah tangga yang mengalami mobilitas perbaikan kesejahteraan (*mover*) pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan tamat sekolah lanjutan atas (33%), perguruan tinggi/akademi (20%), sekolah dasar (30%), dan lainnya tamat sekolah lanjutan tingkat pertama serta sekolah kejuruan.

Faktor penghambat

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan rumah tangga mengalami penurunan kesejahteraan terkait dengan pola hidup, perilaku yang salah dari individu yang bersangkutan, atau bahkan pengurangan hak atas kepemilikan, sifat malas/hanya berpangku tangan, dan mengharapkan bantuan dari orang lain. Contoh yang sering ditemui adalah (kepala) rumah tangga yang memiliki cara hidup yang boros, bermain judi atau perempuan, serta adanya warisan yang dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Selain itu faktor di luar kekuasaannya juga berpengaruh terhadap kemerosotan individu ke tangga yang lebih bawah, seperti karena sakit (faktor kesehatan) atau penuaan (umur semakin tua); "boros, (main) perempuan, judi" (Laki-laki, 62 tahun); "malas" (Perempuan, 59 tahun); "usia makin tua dan faktor kesehatan" (Laki-laki, 62 tahun); "sakit dan boros" (Laki-laki, 36 tahun); "kalau sudah bermain judi berarti harta di rumah bisa habis" (Perempuan, 45 tahun).

Bila dilihat latar belakang pendidikan dari kepala rumah tangganya, di berbagai rumah tangga yang sulit meningkatkan kesejahteraannya dan tetap miskin (*chronic poor*) pada umumnya (sebagian besar) memiliki latar belakang pendidikan yang hanya tamat sekolah dasar (43%), disusul tamat sekolah menengah atas (29%), dan lainnya tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau bahkan buta huruf karena tidak pernah sekolah.

IV. FOKUS KEBIJAKAN, KONDISI INFRASTRUKTUR, DAN MOBILITAS

A. Faktor Kebijakan dan Kondisi Infrastruktur

Kebijakan maupun berbagai program telah memengaruhi kehidupan masyarakat desa maupun komunitas RW 4. Kebijakan atau pun program tersebut dapat berasal dari pemerintah (baik pusat, provinsi, kabupaten, maupun kecamatan/desa) maupun dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Di Desa Noelbaki, termasuk di dalamnya komunitas RW 4, kebijakan atau program-program pemerintah yang (pernah) ada dapat diperoleh informasinya antara lain melalui berbagai diskusi kelompok terarah dan penggalian informasi secara individual. Program-program tersebut ada yang sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, namun ada pula yang dinilai tidak ada manfaatnya.

Kebijakan atau program-program dari pemerintah yang berpengaruh terhadap masyarakat Desa Noelbaki, antara lain dibangunnya Bendungan Tilong pada 1998, pembuatan pos polisi (pospol), pinjaman kredit dari BRI, kebijakan kenaikan harga BBM pada 2005, bantuan bagi pengungsi, bantuan di bidang kesehatan dengan program kartu sehat, pengalihan subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin), kredit usaha tani (KUT), program pengembangan kecamatan (PPK), serta sekolah dan latihan pemberantasan hama terpadu (SLPHT). Sedangkan program-program dari LSM yang membantu masyarakat Noelbaki, antara lain program pinjaman atau kredit untuk masyarakat dari LSM Yayasan Alfa Omega, Koperasi Talenta, LSM Sue Lai, koperasi *Tanaoba Lais Manekat*, dan Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS). Selain itu juga terdapat bantuan modal dalam bentuk simpan pinjam dari LSM Sanlima yang ditujukan bagi kelompok-kelompok.

Di Desa Noelbaki, termasuk komunitas RW 4, sudah tersedia jaringan listrik, jaringan telepon rumah, dan bahkan telepon seluler bukan hal baru di komunitas ini. Selain itu, pasar dan terminal bis kecil/angkutan kota (bemo) tersedia di desa ini. Kedua fasilitas ini terletak dalam satu areal yang berdekatan. Namun, (los-los) pasar tersebut saat ini tidak bisa digunakan oleh masyarakat lokal karena fasilitas tersebut digunakan oleh pengungsi sebagai tempat tinggal sementara. Sebagai gantinya, masyarakat menggunakan sebagian badan jalan untuk berdagang dengan menggelar dagangannya di sebelah kanan-kiri jalan arah terminal angkutan kota.

Fasilitas pendidikan di Desa Noelbaki juga tersedia dari tingkat SD sampai sekolah lanjutan tingkat atas (sekolah swasta). Untuk fasilitas di bidang kesehatan, walaupun di desa tidak terdapat dokter praktik, tersedia bidan dan terdapat puskesmas pembantu (pustu) serta klinik swasta yang melayani masyarakat setempat.

Di desa yang masyarakatnya heterogen seperti Noelbaki ini, terdapat banyak kelompok yang dibentuk berdasarkan etnis/marga, agama, atau atas dasar kesamaan pekerjaan. Kelompok yang dibentuk berdasarkan etnis/marga misalnya UBSP *Fongasama*. Kelompok ini seluruh anggotanya berasal dari suku Flores dan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan keeratan sosial di antara etnis Flores. Salah satu

kegiatan rutin kelompok ini adalah mengadakan kegiatan simpan pinjam di antara para anggotanya. Kelompok etnis lainnya adalah kelompok arisan *Riwu Tenga* yang merupakan kelompok marga dari etnis Sabu. Sedangkan kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan agama misalnya kaum bapa, kaum ibu (wanita GMIT), kaum ibu Gereja Reformasi, dewan pastoral paroki St. Yosef Penfui, kelompok umat *Basis*, paduan suara *Volles Angeli*, kelompok doa *Renha Rosari*, kelompok *Legio Maria*, jemaat rayon I. Sedangkan kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan pekerjaan adalah kelompok tani Rindu Sejahtera dan kelompok tani Usaha Bersama.

B. Tingkat Komunitas

Kebijakan-kebijakan atau program-program, baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang dapat diakses oleh atau diperuntukkan bagi masyarakat desa juga dapat diakses oleh komunitas di RW 4, Dusun Kiuteta. Berbagai program atau kebijakan yang membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas antara lain pembangunan Bendungan Tilong, pembuatan pos polisi (pospol), pembentukan kelompok tani, pembuatan jalan melalui program pengembangan kecamatan, dan sebagainya.

Pembangunan fisik bendungan Tilong yang dilakukan pemerintah dimulai sejak Desember 1998 dan diresmikan pada 12 Mei 2002 dirancang untuk bisa mengairi sawah seluas 1.484 hektar. Dengan dibangunnya bendungan ini maka telah merubah pola tanam petani setempat, yaitu perubahan dalam bentuk pola tanam dari yang awalnya menanam padi hanya sekali dalam setahun kini menjadi dua kali setahun. Sebelum ada bendungan, petani mengandalkan pengairan sawahnya dari tadah hujan. Walau demikian, adanya bendungan ini di musim panas kadang terjadi perebutan dalam pembagian air sehingga menimbulkan pertengkaran di antara penduduk. Sedangkan pembuatan jalan melalui program PPK juga memperlancar pengangkutan hasil pertanian dari sawah menuju desa.

Selain berpengaruh secara positif, kadang-kadang bantuan atau program tersebut tidak berpengaruh, tidak bermanfaat sama sekali, bahkan berpengaruh atau berdampak lanjutan yang sifatnya negatif (sebagai eksek). Contoh eksek program yang memiliki pengaruh negatif pada komunitas adalah dengan adanya bantuan kompensasi atau subsidi sebagai akibat dari kenaikan harga BBM telah membiasakan orang-orang (yang menerima bantuan tersebut) menjadi malas. Selain itu terdapat program yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat hanya sebatas teori saja, tanpa ada praktik atau kegiatan di lapangan. Hal-hal semacam ini membuat komunitas menjadi apriori atau bahkan merasa kesal terhadap program-program dari lembaga swadaya masyarakat.

Hambatan dalam aksesibilitas

Walaupun dapat diakses, namun tidak semua bantuan atau program bisa dinikmati oleh warga komunitas karena terbentur pada berbagai hambatan. Contohnya adalah pinjaman kredit yang disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pinjaman ini walau tersedia, namun kenyataannya sulit diperoleh oleh komunitas karena komunitas dihadapkan pada hambatan sulitnya memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan kredit tersebut.

Di bidang pendidikan, satu-satunya sekolah lanjutan atas swasta yang ada di desa dikelola oleh sebuah yayasan yang dimiliki oleh salah satu warga komunitas RW 4. Sedangkan pasar dan terminal sebagai pusat-pusat kegiatan ekonomi desa berada di perbatasan antara RW 4 dan RW 5. Fasilitas-fasilitas ini mudah di akses oleh komunitas RW 4, kecuali pasar yang masih digunakan untuk menampung para pengunjung. Komunitas atau warga dari RW 4 banyak yang menjadi anggota kelompok etnis, misalnya “Fongasama” yang merupakan kelompok etnis Flores, atau Riwu Tenga yang merupakan kelompok etnis dari Sabu. Selain itu, banyak ditemui juga masyarakat yang menjadi anggota kelompok tani atau kelompok-kelompok gereja.

Keberadaan kelompok-kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan etnis ini memberikan manfaat, keuntungan, atau kemudahan bagi para anggotanya, misalnya memudahkan anggotanya untuk mendapatkan uang tunai, baik dalam bentuk pinjaman maupun hasil dari arisan.

...selain itu saya juga terlibat dalam kegiatan simpan pinjam pada UBSP Jufoe dan UBSP Fongasama. UBSP ini juga dirasakan sangat membantu saya ketika pada masa-masa sulit seperti untuk kebutuhan sekolah dari anak-anak (Sejarah Hidup KM, Laki-laki, 50 tahun).

...kebetulan di desa ini terdapat sebuah UBSP dengan nama Fongasama di mana saya juga merupakan salah satu anggota dari UBSP tersebut yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam yang berdiri sejak 1991. Untuk mendukung usaha ini (kios), maka saya meminjam dari UBSP Fongasama sebesar Rp2 juta yang saya manfaatkan untuk menambah modal usaha kios dan juga pengembangan usaha pertanian (Sejarah Hidup BD, Laki-laki, 40 tahun).

C. Tingkat Rumah Tangga/Individu

Sebagaimana di tingkat komunitas, pada tingkat individu terdapat berbagai kebijakan dan program pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang membantu dalam meningkatkan kesejahteraan, di samping juga terdapat kebijakan yang justru menurunkan kesejahteraan rumah tangga.

Sebagaimana disebutkan dalam FGD tangga kehidupan baik pada kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan, faktor kemauan dan kerja keras sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga ke jenjang atau tangga yang lebih tinggi. Selain itu terdapat faktor luar yang dapat mendorong atau membantu peningkatan kesejahteraan tersebut, yaitu bantuan modal. Bantuan modal ini bisa saja dilakukan oleh (berasal dari) pemerintah maupun swasta (LSM). Bentuknya dapat berupa pinjaman atau kredit, simpan pinjam, bantuan pupuk, ataupun program di bidang ekonomi lainnya. “Program pemerintah yang mendukung usaha pertanian seperti bantuan pupuk dan obat-obatan, kredit usaha tani atau KUT” (Laki-laki, 36 tahun).

Namun demikian, terdapat kebijakan pemerintah yang justru menurunkan kesejahteraan rumah tangga. Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM pada 2005, khususnya kenaikan harga BBM yang terjadi pada

akhir 2005 yang telah menurunkan pendapatan riil rumah tangga-rumah tangga yang ada di komunitas. “.....kenaikan harga BBM membuat kami sulit karena harga-harga barang naik sedangkan hasil jual padi atau beras naik turun, tidak stabil” (Sejarah Hidup STM, Laki-laki, 40 tahun).

Selain itu, banyaknya program dari pemerintah yang tidak menyentuh masyarakat kecil yang menjadi sasaran program telah menurunkan kesejahteraan individu.

...dalam melakukan berbagai usaha ini saya melihat bahwa kebijakan pemerintah kurang mendukung mengembangkan usaha masyarakat kecil. Hal ini terlihat dengan adanya begitu banyaknya dana bagi UKM, tetapi UKM seperti kami sangat sulit untuk mendapat pinjaman dari program tersebut. Bahkan yang memanfaatkan dana tersebut adalah kalangan pengusaha besar. Selain itu juga, ketika saya masih melakukan usaha dagang pinang iris antar pulau, pengusaha kecil selalu dibebani dengan banyaknya pos retribusi sehingga pendapatan saya juga menurun (Sejarah Hidup BD, Laki-laki, 40 tahun).

Walaupun demikian, kesejahteraan rumah tangga dapat dipertahankan dan tidak jatuh menjadi miskin dengan mengkombinasikan berbagai usaha dari dalam dan bantuan dari luar, misalnya dengan bekerja keras, ada pendampingan dan supervisi dari pihak lain, serta adanya bantuan, baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. “Kerja keras dan adanya bimbingan dan pendampingan, serta monitor dari pemerintah” (Laki-laki, 36 tahun); “Bantuan dari LSM misalnya bantuan (ternak) babi dan sapi” (Perempuan, 59 tahun); “Bantuan langsung tunai dan raskin” (Laki-laki, 48 tahun).

Hambatan lain yang dialami oleh rumah tangga atau individu adalah dalam hal akses terhadap pekerjaan. Dari hasil survei rumah tangga, diperoleh informasi bahwa untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta, masyarakat di desa ini mengalami kesulitan. Hal ini dialami oleh kelompok miskin atau *chronic poor* 57%, kelompok kaya (*always rich*) 40%, kelompok keluar dari kemiskinan (*mover*) 33%, dan kelompok jatuh miskin (*faller*) 50%. Semua kelompok mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan.

V. FAKTOR-FAKTOR SOSIAL DAN MOBILITAS

A. Stratifikasi Sosial pada Komunitas

Pada dasarnya, masyarakat di Desa Noelbaki, khususnya komunitas di RW 4, Dusun Kiuteta, tidak membedakan satu dengan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang menjadi patokan atau pedoman masyarakat setempat adalah mereka saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Stratifikasi sosial yang ada hanya menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Namun, penggolongan atas dasar ekonomi ini tidak banyak pengaruhnya dan dianggap tidak penting pada komunitas ini.

Yang penting bagi masyarakat adalah bagaimana mereka bisa eksis dan bertahan hidup dengan cara berkelompok dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil. Semangat kebersamaan di komunitas RW 4 dan di Desa Noelbaki umumnya adalah pengelompokan atas dasar kesukuan/marga, pengelompokan atas dasar kesamaan pekerjaan, dan pengelompokan atas dasar kesamaan agama. Kelompok-kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan-kesamaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan keeratan sosial. Dibentuknya kelompok tani dan kelompok kesukuan adalah untuk memudahkan dalam mengelola dan mendapatkan sumber-sumber ekonomi, seperti bahan baku pertanian, pemasaran hasil pertanian, dan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, serta memudahkan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi secara bersama-sama.

Jelas bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki sifat terbuka sekaligus tertutup. Terbuka dalam arti siapa saja bisa memasuki kelompok tersebut asalkan memenuhi syarat-syarat yang ada. Tertutup dalam arti bahwa komunitas atau orang-orang yang memiliki kesamaan-kesamaan saja yang dapat memasuki kelompok tersebut. Kelompok Fongasama yang merupakan kelompok orang-orang/marga/suku/etnis dari Flores hanya terbuka bagi orang-orang Flores, namun tertutup bagi orang-orang dari suku selain Flores yang ada di Desa Noelbaki. Demikian juga orang-orang yang tidak berprofesi sebagai petani tidak akan/boleh menjadi anggota kelompok tani Rindu Sejahtera misalnya, walaupun kelompok ini terbuka dan bisa dimasuki dari etnis atau agama mana pun. Demikian juga, kelompok-kelompok keagamaan yang bersifat tertutup bagi agama lain, bahkan bagi yang berjenis kelamin berbeda, tetapi terbuka bagi yang seagama dan berjenis kelamin sama, contohnya adalah kelompok kaum ibu/wanita GMIT.

Stratifikasi dari berbagai kelompok di atas tidak serta merta membuat komunitas atau anggotanya otomatis dapat keluar dari kemiskinan. Rumah tangga atau warga yang dapat keluar dari kemiskinan karena adanya usaha atau bekerja keras dan kadang mendapat bantuan dari pihak luar, seperti memperoleh program-program atau bantuan modal. Namun, secara umum peserta FGD menyatakan bahwa keberadaan dan keikutsertaannya dalam kelompok tersebut dirasakan besar manfaatnya.

B. Modal Sosial dan Mobilitas

Dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan-kesamaan etnis/suku/marga, kesamaan agama, atau kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan pekerjaan atau mata pencaharian, pada komunitas di RW 4 dan di Desa Noelbaki, kelompok atau anggotanya memiliki kesamaan kepentingan antara yang satu dengan yang lain, dan saling membantu serta saling mengisi. Dalam kelompok etnis/suku/marga, keeratan sosial berdasarkan kesukuan dibina dan dibangun sebagai modal sosial untuk memenuhi kepentingan bersama. Kelompok ini dibentuk antara lain dengan adanya kesamaan bahasa, budaya, maupun kebiasaan/adat istiadat bagi para anggotanya.

Lain halnya dengan kelompok tani, yang pembentukannya atas dasar kesamaan pekerjaan atau mata pencaharian sebagai petani. Para anggota dari kelompok ini terdiri dari berbagai suku maupun agama yang berbeda. Mereka dipersatukan atas dasar kesamaan kepemilikan lahan atau wilayah hamparan tanah pertanian, yang memiliki kesamaan kebutuhan untuk mengembangkan kehidupan ekonominya. Contoh yang sering dikemukakan adalah memudahkan untuk mengatur pembagian air (pengairan), memudahkan untuk mendapatkan bibit, memudahkan untuk memperoleh pupuk, pengolahan pascapanen (penggilingan), dan lain sebagainya. Melalui kelompok tani ini juga para anggotanya dapat memperoleh bantuan berbagai program dari pemerintah, seperti pelatihan dan penyaluran kredit untuk petani.

Sedangkan kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan agama umumnya kelompok tersebut ditentukan atas dasar tempat tinggal yang berdekatan, jenis kelamin, atau kesamaan tempat ibadah.

Dengan mengikuti kelompok-kelompok ini, para anggotanya (yang aktif) paling tidak akan mendapatkan manfaat berupa informasi. Belum lagi bila ada bantuan yang disalurkan ke masyarakat melalui kelompok-kelompok ini.

C. Faktor-faktor Sosial Lainnya yang Penting pada Tingkat Komunitas dan Rumah Tangga/Individual

Selain kelompok-kelompok di atas, keluarga memiliki pengaruh yang besar berkaitan dengan peningkatan atau penurunan kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga yang diidentifikasi dalam FGD tangga kehidupan kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan, dalam sejarah hidupnya memiliki hubungan yang baik dan erat dengan anggota keluarganya (khususnya dengan pasangan, saudara-saudaranya, atau dengan orang tua/mertuanya), memiliki hubungan baik atau saling menghormati/menghargai dengan anggota masyarakat atau etnis lainnya (baik tetangga dekat maupun orang-orang yang tinggal dalam komunitas tertentu), juga memiliki hubungan sosial yang baik (dalam komunitas yang lebih luas di tingkat dusun atau desa). Bahkan salah seorang responden merasa sejahtera secara rohani karena dedikasinya sebagai penginjil.

Tahun 1995 saya beralih profesi sebagai penginjil dan melakukan penginjilan ke daerah-daerah ... Pada saat itu saya merasa sejahtera secara rohani tetapi secara jasmani kondisinya relatif sama dengan tahun 1973. Saya merasa sejahtera karena seluruh keperluan biaya untuk menginjil sudah ada sponsornya (Sejarah Hidup HS, Laki-laki, 55 tahun).

Hal sebaliknya terjadi karena seseorang yang sedang menjalankan usahanya mengalami kebangkrutan, bersamaan dengan itu harga-harga barang kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan sebagai akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Sekarang ini kalau bicara tentang perkembangan aset, kondisi aset saya menurun karena angkutan kota yang diharap menjadi salah satu sumber pendapatan juga sementara rusak. Sedangkan barang emas sementara ini di pegadaian untuk memenuhi biaya sekolah dan biaya hidup (Sejarah Hidup STM, Laki-laki, 40 tahun).

VI. FAKTOR-FAKTOR POLITIK DAN MOBILITAS

A. Praktik Pelaksanaan Demokrasi Lokal

Pemilihan kepala desa

Di Kabupaten Kupang belum pernah dilakukan pemilihan bupati (pilkada) secara langsung oleh rakyat sampai berakhirnya dilakukannya penelitian lapangan ini. Namun, untuk pemilihan kepala desa sudah dilakukan secara langsung beberapa kali di Desa Noelbaki sejak lama. Sebagaimana di desa-desa di Indonesia, untuk menjadi kepala desa di Desa Noelbaki harus dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Pemilihan kepala desa di Noelbaki untuk pertama kalinya dilakukan pada 1958, dan terpilih sebagai kepala desa saat itu adalah Petrus Pehang. Kepala desa pertama ini sekaligus mengakhiri era *temukung*, yang sejak pemerintahan penjajahan Belanda merupakan penguasa di tingkat kampung atau desa, di bawah *vetor* (setingkat bupati).

Desa Noelbaki yang terdiri dari lima dusun dan setiap dusun umumnya didominasi oleh suku tertentu. Di tingkat desa jumlah masing-masing suku berimbang. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa di Noelbaki menjadi menarik untuk dicermati/diamati. Pada pemilihan kepala desa yang terakhir, terdapat lima calon yang mendaftar, yang kemudian diseleksi di tingkat kecamatan, secara administratif dan melalui proses wawancara. Hasil seleksi ini memunculkan tiga calon yang memenuhi syarat dan akhirnya dipilih secara langsung oleh rakyat Noelbaki. Ada dua pendapat yang berbeda antara FGD *Mata Pencarian, Kebebasan, Kekuasaan, Ketimpangan, Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal* kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan. Kelompok laki-laki menilai bahwa pemilihan kepala desa berjalan secara demokratis dan terbuka, sementara kelompok perempuan menilai proses pemilihannya tidak jujur dan kotor. Pelaksanaan pemilihan kepala desa ini akhirnya dimenangkan oleh calon yang berasal dari Dusun Dendeng. “Untuk proses pemilihan kepala desa waktu itu melalui suara terbanyak” (Laki-laki, 50 tahun), yang dilakukan secara “terbuka dan demokratis” (Laki-laki, 49 tahun); para kandidat kepala desa pun “melakukan pendekatan kepada keluarga-keluarga” (Perempuan, 32 tahun); tetapi kadang-kadang “tidak jujur” (Perempuan, 32 tahun); “tidak jujur, politik itu kotor” (Perempuan, 46 tahun). Pemilihan kepala desa di Noelbaki ini menarik untuk diamati dan dicermati, karena ada kecenderungan bahwa bila kepala desanya terpilih dari dusun tertentu (yang didominasi oleh suku tertentu), maka dusun lainnya (yang didominasi oleh suku lain) menjadi semacam oposan.

Pada saat kampanye dalam rangka pemilihan kepala desa, para calon kepala desa menyampaikan atau mengkampanyekan apa yang akan diperbuat apabila kelak dia terpilih menjadi kepala desa. Namun kenyataannya, setelah terpilih belum tentu kepala desa tersebut melaksanakan janji-janjinya sesuai yang dijanjikan pada saat kampanye. “Biasanya mereka menyampaikan visi dan misi yang dilaksanakan ketika terpilih nanti” (Laki-laki, 38 tahun); “Tapi kebanyakan hanya janji-janji saja” (Laki-laki, 73 tahun); “Namanya juga rencana, jadi mau dilaksanakan atau tidak bukan masalah” (Perempuan, 62 tahun).

Partisipasi masyarakat

Selama sepuluh tahun terakhir terjadi perubahan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan pengambilan keputusan di setiap jenjang. Perubahan tersebut menunjukkan kecenderungan yang meningkat, khususnya sejak digulirkannya reformasi pada 1998. Banyak masyarakat yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan sejak saat itu juga demokrasi mulai digalakkan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat RT, RW, dusun, sampai desa. Partisipasi masyarakat di tingkat RT dilakukan seluruh warga RT yang bersangkutan dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan di tingkat RT. Namun, pada tingkatan di atasnya RW dan dusun, partisipasi masyarakat diwakilkan kepada anggota masyarakat yang menjadi tokoh di masing-masing tingkatan tersebut. Pada setiap tingkatan tersebut terdapat warga yang ditokohkan yang akan mewakili warga untuk menghadiri pertemuan pada tingkat di atasnya.

Selain berjenjang dalam pengambilan keputusan di setiap tingkatan, suara perempuan juga mulai didengar, bahkan diminta pendapatnya dalam setiap kesempatan pertemuan. Dalam suatu rapat tingkat RT atau desa misalnya, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ditanyakan bagaimana pendapat dari peserta perempuan yang hadir. Namun, dalam mengupas partisipasi masyarakat apakah pengaruhnya besar atau kecil dalam pengambilan keputusan, terdapat perbedaan antara peserta FGD *Mata Pencaharian, Kebebasan, Kekuasaan, Ketimpangan, Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal* kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kelompok laki-laki menilai bahwa masyarakat memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan yang diambil dan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, dusun, sampai desa. Namun menurut kelompok perempuan, pengaruh tersebut hanya sedikit. "Biasanya kalau di dusun dimulai dari tingkat RT, RW, dusun, baru ke desa" (Laki-laki, 73 tahun); "Masyarakat juga mempunyai pengaruh karena dilibatkan dalam pengambilan keputusan" (Laki-laki, 37 tahun); "Pengaruh masyarakat dalam pengambilan keputusan ada, tetapi kecil sekali" (Perempuan, 47 tahun).

B. Praktik Tata Kelola Pemerintahan Lokal

Pelayanan pemerintah

Walaupun dalam pengambilan keputusan di setiap jenjang yang ada di desa terdapat kemajuan, antara lain dengan melibatkan lebih banyak masyarakat dan perempuan, namun perubahan-perubahan demokratisasi di tingkat bawah belum dibarengi dengan pengelolaan pemerintahan lokal yang lebih baik. Para peserta FGD *Mata Pencaharian, Kebebasan, Kekuasaan, Ketimpangan, Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal* kelompok laki-laki dan kelompok perempuan memiliki penilaian yang sama tentang pelayanan pemerintah desa kepada masyarakatnya, yaitu bahwa pelayanan pemerintahan desa sama saja dari dulu hingga sekarang. Peserta ada yang menilai bahwa pengelolaan program di tingkat desa melibatkan masyarakat, namun ada pula yang menilai bahwa pelibatan masyarakat tersebut malah menurun. "Menurut saya, dukungan pemerintah desa sekarang lebih baik. Contoh saya sendiri. Baru sekarang ini dilibatkan oleh pemerintah desa dalam kegiatan PKK" (Perempuan, 46 tahun).

Harapan para peserta FGD kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat di masa mendatang, mereka berharap pelayanannya akan semakin baik seiring dengan rencana pemekaran wilayah menjadi dua desa. Namun demikian, mereka optimis akan terjadi tata pemerintahan yang lebih baik, walaupun dengan syarat tergantung dari pemimpinnya.

Kolusi, korupsi, dan nepotisme

Secara umum, walaupun perkembangan demokrasi menunjukkan kemajuan, hal ini belum banyak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang menjadi faktor penyebabnya adalah masih adanya kasus korupsi di berbagai tingkatan. Untuk pengelolaan pemerintahan tingkat provinsi sampai nasional (pusat), masyarakat mengetahui informasi mengenai korupsi bersumber dari media elektronik maupun cetak, seperti radio, televisi, atau surat kabar. Namun untuk pengelolaan pemerintahan di tingkat desa sampai kabupaten, masyarakat menilai masih ada korupsi. Misalnya korupsi di tingkat desa terjadi pada masa pemerintahan kepala desa periode sebelumnya (periode sebelum kepala desa yang sekarang).

Tingkatan korupsi ini mengerucut dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa, dalam arti bahwa korupsi terjadi secara luas di tingkat nasional, dan semakin sedikit di tingkat desa. Korupsi yang terjadi di tingkat desa beberapa waktu lalu sampai saat ini belum ada penyelesaian. Jenis korupsi yang terjadi di desa tidak disebutkan secara spesifik, namun sampai saat ini korupsi tersebut belum diselesaikan secara tuntas. “Di tingkat desa memang ada tetapi sampai saat ini belum ada penyelesaian” (Laki-laki, 50 tahun); “Ini terjadi pada masa pemerintahan kepala desa yang lalu dan sebagian kecil saja pegawai pemerintah yang terlibat” (Laki-laki, 37 tahun).

Selain itu, juga terindikasi adanya nepotisme dalam penyaluran bantuan program. Hanya warga masyarakat tertentu saja yang memperoleh bantuan program, terutama keluarga dekat dari aparat desa yang mengelola program tersebut.

Dulu bantuan lebih terasa, sekarang tidak. Sekarang untuk mendapat bantuan harus daftar, setelah mendaftar disortir lagi. Yang dapat hanya orang-orang tertentu saja (Perempuan, 32 tahun).

Masyarakat mengharapkan agar kasus-kasus korupsi bisa diselesaikan, karena hal ini berpengaruh terhadap upaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kami juga harap agar pemerintah bisa lebih baik, hanya kami takut jangan sampai tingkat korupsi bertambah parah karena pengaruhnya pada masyarakat kecil (Laki-laki, 73 tahun).

Pada FGD *Mata Pencaharian, Kebebasan, Kekuasaan, Ketimpangan, Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal* kelompok perempuan sendiri terdapat perbedaan dalam menyikapi peranan pemerintah dalam mengelola bantuan masyarakat. Perbedaan tersebut terletak pada seberapa besar tingkat keparahan korupsi dalam mengelola bantuan pemerintah, yaitu ada yang berpendapat tidak ada korupsi, sebagian kecil saja, bahkan ada yang menilai hampir semua bantuan dikorupsi.

C. Arti Penting Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal terhadap Kesejahteraan Komunitas

Sebagaimana telah diuraikan di atas, sampai saat ini perkembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan menunjukkan kemajuan, walaupun kemajuan tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan demokrasi di tingkat nasional dan regional, juga berpengaruh terhadap kemajuan demokrasi di tingkat desa. “Permasalahannya hanya tergantung pada warga sendiri. Tapi saya kira pemerintah desa sekarang ada perubahan dibanding dulu” (Laki-laki, 62 tahun).

Kesejahteraan masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh maju mundurnya kelompok-kelompok yang diikuti oleh masyarakat, seperti kelompok tani dan kelompok etnis. Kelompok-kelompok ini pada umumnya membantu anggota-anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraannya, seperti dengan mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan, kegiatan simpan pinjam, arisan, dan kegiatan yang bersifat produktif lainnya. Juga peranan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan pinjaman kredit telah membantu masyarakat setempat. Contohnya pinjaman dari Koperasi *Tanaoba Lais Manekat* (TLM), kelompok swadaya masyarakat (KSM) Tetesan Embun, kelompok wanita tani Theresia Calcuta, dan kelompok lainnya.

Dengan terjadinya perubahan menuju demokrasi yang lebih baik, maka masyarakat berharap kesejahteraan dapat meningkat di masa depan, paling tidak bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki usaha kecil. Demokrasi yang diharapkan masyarakat dipenuhi pemerintahan lokal, khususnya pemerintah desa, antara lain adalah keterbukaan (*transparency*) di berbagai hal, sebagai contoh adalah keterbukaan dalam penyaluran bantuan program dari pemerintah.

Untuk menunjang harapan tersebut dan meningkatkan demokrasi di wilayah ini terdapat usulan agar diadakan monitoring pada semua tingkatan pemerintah, apalagi pada masa mendatang Desa Noelbaki akan dimekarkan menjadi dua desa. Monitoring berbagai bantuan ini penting bagi masyarakat, karena adanya penyelewengan program akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kami minta agar harus lebih banyak dilakukan monitoring pada semua level” (Laki-laki, 38 tahun); “Saya kira khusus untuk Noelbaki ini akan semakin baik karena akan ada pemekaran sehingga pelayanan akan semakin baik” (Laki-laki, 62 tahun); “Kami juga harap agar pemerintah bisa lebih baik, hanya kami takut jangan sampai tingkat korupsi bertambah parah karena pengaruhnya pada masyarakat kecil” (Laki-laki, 73 tahun).

D. Arti Penting Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal terhadap Masyarakat untuk Keluar dari Kemiskinan

Kondisi demokrasi dan Tata Kelola pemerintah desa dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dan kemungkinan membantu untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini terkait dengan peraturan perizinan bagi masyarakat desa yang akan melakukan kegiatan usaha. Terdapat usaha-usaha yang memerlukan izin pemerintah desa, seperti usaha kios, jual beli hewan, dan sebagainya. Biasanya

dalam bentuk surat keterangan izin usaha seperti untuk usaha kios dan prosesnya juga tidak sulit, datang hari ini bisa langsung dapat (Laki-laki, 38 tahun);

Untuk jual hewan juga harus ada izin dari desa (Laki-laki, 73 tahun).

Berdasarkan berbagai hal tersebut di atas, terdapat berbagai faktor yang dapat dilakukan pemerintah (daerah atau desa) untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, atau bahkan keluar dari kemiskinan. Misalnya pemerintah (daerah atau desa) dapat melakukan kemudahan dalam pemberian izin untuk usaha, tidak berbelit-belit persyaratannya, dan proses pengurusannya cepat. Selain itu, informasi tentang peluang pasar dan usaha, serta informasi harga, dapat mendukung pengembangan usaha masyarakat. "Yang perlu dilakukan adalah membantu kami dalam berbagai informasi seperti harga, peluang kredit, dan sebagainya yang dapat mendukung usaha masyarakat" (Laki-laki, 62 tahun); "Informasi tentang peluang usaha dan pasar" (Laki-laki, 38 tahun).

Berbagai faktor tersebut secara bersama-sama diperlukan untuk meningkatkan usaha masyarakat, mulai dari kemudahan pemberian perizinan, peluang usaha, informasi pasar, informasi kredit, dan sebagainya. Faktor-faktor pendukung untuk usaha ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kenyataan selama ini yang dialami oleh warga masyarakat menunjukkan bahwa peraturan pemerintah sebenarnya tidak menghambat, namun orang-orang yang menjalankan peraturan tersebut yang menghambat. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang responden sejarah hidup berikut yang dua kali terhambat pada pengurusan perizinan saat memulai melakukan usahanya:

Sepanjang pengalaman saya, kebijakan pemerintah pada umumnya tidak pernah menghambat masyarakat untuk maju termasuk dengan usaha saya, tetapi orang-orang yang melaksanakan kebijakan itu yang lebih menghambat. Seperti pengalaman yang sudah saya ceritakan, di mana saya pernah merasa dipersulit dalam memperoleh izin usaha abon dendeng dan izin usaha penggilingan padi dengan alasan yang terkesan dibuat-buat. Seharusnya pemerintah memberikan dukungan terhadap pertumbuhan usaha-usaha ekonomi produktif... (Sejarah hidup HS, Laki-laki, 55 tahun).

VII. KESENJANGAN DAN MOBILITAS

A. Kesenjangan pada Tingkat Komunitas

Arti kesenjangan

Kesenjangan atau ketimpangan (*disparity*) berasal dari kata dasar senjang atau timpang yang berarti perihal ketidakseimbangan, ketidaksimetrisan, jurang pemisah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:1038). Terdapat berbagai makna tentang *disparity*, antara lain adalah *the condition or fact of being unequal, as in age, rank, or degree; difference: "narrow the economic disparities among regions and industries"* (Courtenay Slater); *unlikeness; incongruity* (The American Heritage Dictionary of the English Language 2006) (Kesenjangan adalah keadaan atau kenyataan yang tidak sama, seperti umur, pangkat, gelar atau tingkat; perbedaan; "mengurangi kesenjangan ekonomi di antara wilayah dan industri" (Courtenay Slater); ketidaksamaan; ketidaksesuaian atau ketidakharmonisan). Juga, *disparity* diartikan sebagai *the state of being different or dissimilar (as in the sensory information received)* (Merriam-Webster's Medical Dictionary 2006) atau *inequality or difference in some respect* (Worldnet 2.0, 2003 Princetown University) (Kesenjangan adalah ketidaksamaan atau perbedaan dalam arti informasi yang diterima atau ketimpangan atau perbedaan dalam beberapa hal).

Kesenjangan pada tingkat komunitas

Di tingkat desa, berdasarkan data Profil Komunitas ditemukan bahwa walaupun agama yang dianut masyarakat desa beragam, namun hal ini tidak menimbulkan ketimpangan secara ekonomi maupun politik. Demikian juga, keberagaman etnis di Desa Noelbaki tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi maupun politik. Perbedaan agama maupun etnis ternyata tidak mengakibatkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara penduduk satu agama dengan agama lainnya, juga antara penduduk satu etnis dengan etnis lainnya karena kesempatan terbuka bagi seluruh warga untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas. Dengan demikian, banyak ditemui beberapa anggota komunitas memiliki kesejahteraan yang hampir sama walaupun etnis dan/atau agamanya berbeda.

Dalam menyikapi kesenjangan ekonomi di tingkat komunitas, baik kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan dalam FGD *Mata Pencarian, Kebebasan, Kekuasaan, Kesenjangan, Demokrasi, dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal* memiliki pemahaman yang sama, yaitu hanya terjadi perubahan sedikit peluang untuk melakukan kegiatan ekonomi di desa. Perubahan yang kecil ini disebabkan oleh pengaruh pengungsi yang berada di Desa Noelbaki sejak 1999. Terminal dan pasar yang seharusnya adalah sebagai pusat kegiatan ekonomi fungsinya termarjinalkan dengan keberadaan para pengungsi di kedua tempat tersebut. "(peluang untuk melakukan kegiatan ekonomi di desa dalam 10 tahun terakhir) berubah tetapi kecil" (Perempuan, 46 tahun); "Menurut saya ada perubahan di mana semakin meningkat" (Laki-laki, 62 tahun); "Dengan adanya terminal ini sebenarnya ada peluang, tetapi karena dipakai oleh pengungsi sehingga sama saja" (Laki-laki, 50 tahun).

Perubahan kecil yang terjadi menyangkut atau berkaitan dengan penyampaian informasi yang tidak sama di tingkat atas dengan di tingkat bawah. Misalnya mengenai informasi. Dari kabupaten atau kecamatan ke desa mudah, tetapi dari desa kepada masyarakat sulit sekali. Masyarakat di sini sulit sekali memperoleh informasi dari pemerintah desa. Hal lainnya, kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari peluang usaha baru (Laki-laki, 46 tahun).

B. Kesenjangan Ekonomi pada Tingkat Rumah Tangga/Individual

Selama 10 tahun terakhir ini, jurang perbedaan atau kesenjangan ekonomi pada tingkat rumah tangga, yaitu antara rumah tangga yang paling atas dan yang paling bawah perbedaannya hanya sedikit saja. Peserta FGD kelompok perempuan dan kelompok laki-laki memiliki alasan yang berbeda. Menurut kelompok perempuan, perbedaan tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah rumah tangga yang paling atas dan rumah tangga yang paling bawah. Peserta FGD menyebut bahwa jumlah rumah tangga, baik yang paling bawah (*amamuit*) maupun paling atas (*amuit*) jumlahnya sedikit. “*amamuit* dulu di desa lebih sedikit dari sekarang”, (Perempuan, 66 tahun); “Kalau *amuit* di Desa Noelbaki dulu itu lebih sedikit dari sekarang, karena dulu hidup masih susah” (Perempuan, 59 tahun). Menurut kelompok laki-laki, perbedaan tersebut ditunjukkan dengan sedikit banyaknya jumlah anak tangga, yaitu empat anak tangga pada 10 tahun lalu dan lima anak tangga pada saat ini. “(kesenjangan ekonomi) ada perbedaan, yaitu dulu hanya empat tangga sekarang ada lima tangga” (Laki-laki, 36 tahun).

Perbedaan tersebut (walaupun kecil) disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan, kondisi fisik bangunan rumah, dan aset (seperti ternak) yang dimiliki rumah tangga. Yang menarik adalah menurut peserta FGD, faktor tingkat pendidikan tidak menjadi faktor pembeda, terutama pada sepuluh tahun yang lalu. Kelompok masyarakat yang sejahtera bisa saja berpendidikan SD sampai sarjana. Yang berpendidikan rendah umumnya bekerja sebagai wiraswasta atau pengusaha, bahkan ada yang sejahtera karena mendapat warisan. Masyarakat yang sejahtera dan berpendidikan tinggi umumnya bekerja sebagai pegawai.

Perbedaan-perbedaan ini mengalami sedikit perubahan dalam sepuluh tahun terakhir ini, misalnya kelompok masyarakat yang sejahtera umumnya adalah yang berpendidikan tinggi, dan umumnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada lembaga pemerintah yang ada di desa ini.

Berbagai individu berusaha keluar dari kemiskinan melalui berbagai cara yang berbeda, misalnya dengan rela meninggalkan pekerjaan lama walaupun pekerjaan yang lama ini menjanjikan keamanan. Selain itu, mereka juga menerima tantangan berusaha yang penuh risiko. Untuk meningkatkan kesejahteraannya mereka melakukan berbagai macam pekerjaan, mengikuti berbagai kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan ekonomi. Di tingkat komunitas, kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan ekonomi antara lain adalah kelompok tani dan kelompok etnis yang memiliki kegiatan bersifat produktif, misalnya kegiatan simpan pinjam. Namun demikian, faktor yang penting bagi kelompok masyarakat yang bisa keluar dari kemiskinan (*movers*) adalah kemauan dari dalam diri individu tersebut, seperti tekad, kemauan yang keras, mau bekerja keras, serta tidak cepat putus asa. Selain itu, juga peningkatan kemampuan diri dengan mengikuti

berbagai kursus seperti kursus komputer, bahasa Inggris, koperasi, atau pelatihan usaha kecil. Di tingkat komunitas, kelompok ini juga memiliki hubungan tolong-menolong dan hubungan baik antar warga.

Sementara itu, faktor yang menghambat bagi komunitas untuk meningkatkan kesejahteraannya pada umumnya berasal dari faktor-faktor eksternal diri individu yang bersangkutan. Kedatangan pengungsi di tingkat desa atau komunitas tersebut pada umumnya berdampak negatif, walau ada sedikit individu yang menilai ada dampak positifnya. Selain itu, hambatan dialami individu pada saat pengurusan perizinan dari pemerintah untuk memulai usahanya. Warga masyarakat menilai bahwa peraturan pemerintah tidaklah menghambat, tetapi orang-orang yang menjalankan peraturan tersebut yang menghambat. Misalnya adanya program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, ternyata dalam pelaksanaan atau praktik di lapangan, yang menerima program tersebut adalah pengusaha besar. Kasus lainnya adalah dalam pengurusan perizinan usaha penggilingan padi dan perizinan usaha abon dendeng. Kadang-kadang dalam proses perizinan untuk usaha kecil dirasakan sama dengan perizinan untuk usaha besar sehingga prosedur perizinan ini dinilai rumit dan administrasi yang banyak menjadi kendala untuk memulai usaha kecil.

C. Jenis-jenis Kesenjangan Lainnya

Kesenjangan lainnya yang sedikit membedakan satu dengan lain anggota komunitas adalah masyarakat biasa dan mereka yang memiliki jabatan di lingkungannya, sebut saja pejabat lokal. Pejabat lokal ini nampaknya dihormati oleh warga komunitas di RW 4, atau bahkan di tingkat desa. Mereka adalah yang memiliki tugas atau kegiatan yang melayani keperluan masyarakat atau komunitas seperti kepala desa, sekretaris desa, aparat desa, kepala dusun, ketua RW, Ketua RT, pengurus PKK, dan sejenisnya. Salah satu kewenangan penting dari aparat desa adalah dalam hal penyaluran berbagai bantuan bagi masyarakat, baik yang berasal dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Kesenjangan tersebut tidak mengindikasikan akan adanya perbedaan kesejahteraan atau perbedaan di bidang ekonomi, namun kesenjangan dalam hal pengaruh jabatan mereka terhadap komunitas, bahkan dapat membina hubungan baik dengan komunitas. Salah satu indikasi pejabat lokal diminati komunitas dapat dilihat dari tingginya keinginan mereka dan kesediaan untuk menjadi kepala desa. Para pejabat lokal ini menjadi tumpuan warga masyarakat apabila di daerah mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Segala bantuan ini umumnya melalui pejabat-pejabat lokal ini.

VIII. KEBEBASAN, KEKUASAAN, AGENSI INDIVIDUAL, DAN MOBILITAS

A. Memahami Kebebasan dan Kekuasaan: Perspektif dari Bawah pada Tingkat Komunitas

Kebebasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kebebasan adalah keadaan bebas atau kemerdekaan. Bebas diartikan sebagai lepas sama sekali; lepas dari; tidak dikenakan (pajak, hukuman, dan sebagainya); tidak terikat; merdeka; tidak terdapat (didapati) lagi (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI, 2005:118). Pemahaman para peserta FGD bertopik Mata pencaharian, Kebebasan, Kekuasaan, Ketimpangan, Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal tentang kebebasan tidak berbeda antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Mereka memahami kebebasan sebagai suatu keadaan bebas untuk melakukan segala sesuatu tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain, baik dalam menjalankan agamanya, usahanya, mengeluarkan pendapat, atau melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Kebebasan ini dimiliki oleh semua golongan atau kelompok, baik kelompok miskin maupun kaya.

Dilihat dari perspektif gender, peserta FGD menilai bahwa laki-laki lebih bebas daripada perempuan. “Laki-laki lebih bebas” (Perempuan, 46 tahun dan Perempuan, 40 tahun); “Ibu-ibu selalu di rumah. Kalau kita mau jalan-jalan, bapak langsung bilang kalau pulang lama sekali, kita belum masak. Di sini bapak-bapak tidak boleh masak atau kerja di dapur” (Perempuan, 48 tahun).

Namun demikian terdapat kegiatan-kegiatan yang sifatnya khusus sehingga sulit dibedakan makna kebebasan antara laki-laki dengan perempuan, misalnya dalam kegiatan PKK yang terlibat adalah kaum perempuan.

Terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperoleh kebebasan, antara lain dengan memilih jenis pekerjaan, pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan bersama, atau menghargai dan menghormati sesama anggota masyarakat. Kebebasan yang didapat dari jenis pekerjaan misalnya adalah pekerjaan sebagai petani yang pekerjaannya tidak diatur oleh orang lain. Sedangkan pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat diperlukan untuk memberikan pemahaman mengenai pluralisme. Pemahaman mengenai pluralisme ini penting bagi masyarakat desa mengingat komunitas yang ada di Desa Noelbaki terdiri dari berbagai unsur etnis yang memiliki perbedaan adat, kebiasaan, bahasa daerah, dan agama.

Peserta FGD mengalami kesulitan untuk menghubungkan antara kebebasan dengan keluar dari kemiskinan, faktor yang memengaruhi faktor lainnya. Orang yang tidak sejahtera umumnya tidak bebas, atau bahkan disebut sebagai orang yang kurang pergaulan, juga dinilai sebagai orang yang maunya menang sendiri. Sebaliknya orang yang hidupnya makmur (atau sejahtera) tidak ada yang tidak memiliki kebebasan. Ketika ditanya, apakah perlu kebebasan dulu baru bisa keluar dari kemiskinan, ataukah setelah

bisa keluar dari kemiskinan baru ada kebebasan. Peserta menilai bahwa kesejahteraan seseorang menentukan bebas tidaknya seseorang.

Keberadaan pengungsi di Desa Noelbaki telah menimbulkan konflik serta ketegangan sosial dan hal ini jelas berpengaruh terhadap kebebasan komunitas lokal dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Konflik antara penduduk lokal dengan pengungsi yang menempati areal terminal bus dan pasar telah membuat penduduk lokal tidak lagi dapat melakukan proses jual beli di pasar tersebut secara bebas. Selain itu, dengan adanya kasus pencurian yang meningkat, penduduk lokal juga was-was terhadap keamanan tanaman dan binatang/ternak piaraannya. Konflik ini juga berimbas pada kebebasan penduduk lokal untuk memperoleh nafkah. Pengungsi yang mau melakukan apa saja dengan upah tenaga kerjanya dibayar dengan harga murah. Hal ini jelas berpengaruh atau bahkan menurunkan posisi tawar (*bargaining position*) tenaga kerja penduduk lokal, yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi penduduk lokal. Demikian juga “banting harga” sayur dan buah-buahan yang dijual pengungsi juga berpengaruh terhadap harga jual sayur dan buah-buahan yang dijual oleh penduduk lokal.

Bahkan pada saat terjadinya konflik terbuka, seperti perkelahian antara penduduk lokal dengan pengungsi pada awal Januari 2000, sebagian besar warga atau komunitas di RW 4 mengungsi ke luar desa yang lebih aman selama kurang lebih seminggu. Akibatnya, komunitas kehilangan kebebasan untuk melakukan aktivitas di tempat tinggal dan sekitarnya, seperti bekerja, berolahraga, bersosialisasi, atau bagi remaja dan anak-anak, aktivitas bermain dan bersekolah.

Kekuasaan

Kekuasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kuasa untuk mengurus atau memerintah; kemampuan atau kesanggupan; daerah yang dikuasai; kemampuan orang untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik (KKBI, 2005:604). Peserta FGD dengan topik “Mata Pencaharian, Kebebasan, Kekuasaan, Kesenjangan, Demokrasi, dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal” memaknai kekuasaan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang, memerintah, memimpin, memiliki, mengambil sesukanya dan hak seseorang. (kekuasaan adalah) Perlakuan sewenang-wenang, termasuk kebijakan dan keputusan yang hanya berdasarkan kehendak atau kemauan sendiri saja. (Perempuan, 46 tahun); Kekuasaan adalah hak seseorang (Laki-laki, 50 tahun).

Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dalam FGD tersebut berbeda dalam menyikapi praktik kekuasaan yang ada di dalam komunitas, bahkan perbedaan juga terjadi di antara peserta kelompok perempuan sendiri. Kelompok laki-laki dalam FGD Mata Pencaharian, Kebebasan, Kekuasaan, Kesenjangan, Demokrasi, dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal menilai bahwa dalam setiap komunitas tidak ada perbedaan kesejahteraan antara mereka yang memiliki kekuasaan dan yang tidak, sementara sebagian peserta kelompok perempuan menilai terdapat perbedaan, misalnya antara tokoh yang berpengaruh dengan masyarakat kecil. Komunitas yang memiliki kekuasaan direpresentasikan dengan tokoh masyarakat, aparat desa, pengurus kelompok, atau pemimpin organisasi.

Untuk mendapatkan kekuasaan yang besar, berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat antara lain melalui pendidikan atau peningkatan kemampuan pribadi yang bersangkutan. Masyarakat Noelbaki tidak melihat kekayaan sebagai sumber kekuasaan. Walaupun setiap orang menghargai dan menghormati satu sama lain dan tidak melihat kesejahteraan (ekonomi)nya. Namun, di Desa Noelbaki orang makmur tidak ada yang tidak berkuasa, sedangkan orang yang tidak mampu tidak mempunyai kekuasaan. “Saya kira yang penting di sini adalah tingkat pendidikan, kemampuan dan saling menghormati serta saling menghargai menjadi hal utama” (Laki-laki, 38 tahun).

Di kalangan masyarakat muncul pendapat bahwa dengan kekuasaan, seseorang akan dapat keluar dari kemiskinan. Kekuasaan itu tidak jauh dari orang-orang yang berpengaruh. Orang yang tingkat kesejahtraannya tinggi memiliki pengaruh dan sebagainya.

Konflik yang terjadi di desa selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir tidak berpengaruh pada hubungan-hubungan kekuasaan dalam komunitas. Ini karena konflik yang terjadi adalah konflik antara penduduk lokal dengan pengungsi, dalam arti bahwa pengungsi tidak memiliki akses untuk berkuasa di desa atau komunitas tersebut. Komunitas pengungsi berada tersendiri dan terpisah di kamp pengungsian yang terlokalisasi, sementara masyarakat lokal berada di perkampungan (dusun-dusun). Walaupun ada pengungsi yang tinggal menyatu dengan penduduk lokal, jumlahnya tidak banyak dan pengaruhnya kecil.

Sehubungan dengan masuknya ekspengungsi Timor Timur ...yang akhirnya menimbulkan konflik dengan warga lokal pada 2000 dirasakan cukup mengganggu saya dan keluarga. Di mana waktu itu anak-anak saya dan barang-barang berharga kami terpaksa dipindahkan ke keluarga kami di Sikumana (di Kota Kupang) selama seminggu ... (Sejarah Hidup KM, Laki-laki, 50 tahun).

Dengan demikian, para pengungsi tidak memiliki kekuasaan secara *de jure* dalam pemerintahan desa atau tingkat di bawahnya, walaupun secara *de facto* para pengungsi berkuasa di jalan-jalan desa, misalnya sebagai penarik pajak bemo (angkutan kota) yang masuk ke terminal.

B. Agensi Individual dalam Sejarah Hidup: Ilustrasi pada Tingkat Rumah Tangga

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rumah tangga untuk dapat keluar dari kemiskinan banyak ditentukan oleh rumah tangga itu sendiri. Pola ini dapat dilihat dari perilaku hidupnya, baik yang berkaitan dengan kegiatan hidupnya, pola konsumsi atau pembelian barang, pola hubungan dengan keluarga dan orang lain, serta tekad dan kerja keras untuk mencapai hidup yang lebih baik. Pola hidup yang mendukung suatu rumah tangga keluar dari kemiskinan adalah motivasi diri untuk bekerja keras tanpa mudah menyerah. Selain itu, kegigihan atau kemauan keras untuk bergabung dengan berbagai organisasi (baik organisasi ekonomi, keagamaan, maupun etnis) dan aktif di dalamnya, baik sebagai anggota atau bahkan menjadi pengurus kelompok. Dalam pembelian barang, pertimbangan untuk mengembangkan usaha menjadi faktor penentu dalam mengambil

keputusan untuk membeli sesuatu barang misalnya, tidak semata-mata yang bersifat konsumtif tetapi barang produktif dan/atau digunakan untuk investasi.

Faktor dari dalam individu yang dapat membantu suatu rumah tangga keluar dari kemiskinan adalah rasa percaya diri yang terus berkembang seiring bertambah usia dan pengalamannya, yang kemudian ikut membentuk atau meningkatkan kepercayaan diri. Rasa percaya diri ini muncul bersama aktifnya individu dalam berbagai organisasi, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Kelompok-kelompok ini dimanifestasikan ke dalam kelompok etnis/marga, kelompok tani, maupun kelompok agama/doa, yang dapat menunjang para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui berbagai kegiatan yang membantu para anggota, seperti kegiatan gotong-royong, simpan pinjam, arisan, atau bahkan penyaluran bibit, pupuk, pengolahan pascapanen, serta informasi pemasaran hasil yang diproduksi oleh anggota kelompok.

Selain usaha dan tekad yang keras, hubungan keluarga yang harmonis dan kekeluargaan ikut menunjang peningkatan kesejahteraan. Hubungan yang harmonis ini merupakan dukungan untuk pengembangan usaha dan motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bersangkutan.

Faktor-faktor lainnya yang ikut mendorong peningkatan kesejahteraan adalah hubungan baik dengan pihak di luar keluarga, misalnya dengan tetangga, rekan kerja, dan lingkungan yang lebih luas. Bagi rumah tangga yang membuka warung atau kios, hubungan baik dengan tetangga dan lingkungan yang lebih luas ini sangat penting, antara lain sebagai relasinya, baik sebagai pemasok barang dagangan maupun sebagai konsumennya.

Orang-orang atau rumah tangga-rumah tangga yang telah cukup mapan dan dalam sepuluh tahun terakhir termasuk ke dalam kelompok yang dapat mempertahankan kekayaannya, pada umumnya telah memiliki hubungan positif seperti yang diuraikan di atas. Yang membedakan di antara mereka adalah dalam hal pembelian aset. Kelompok rumah tangga yang mempertahankan kekayaannya, hampir semuanya mengumpulkan aset yang nilai jual kembalinya diprediksi akan lebih tinggi, seperti tanah, rumah, dan emas. Memang tujuan pembelian tanah umumnya digunakan untuk berkebun atau menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Tetapi dengan berjalannya waktu, nilai tanah tersebut meningkat. Hal yang sama terjadi pada aset dalam bentuk rumah dan emas.

Sejarah hidup responden menunjukkan bahwa responden yang diidentifikasi peserta FGD tangga kehidupan ke dalam kelompok yang bisa keluar dari kemiskinan (*movers*) pada umumnya memiliki kemauan dan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kegiatan yang mereka lakukan antara lain berani mengambil risiko dengan meninggalkan pekerjaan yang menjanjikan keamanan di masa depan dan berubah menggeluti pekerjaan baru yang berisiko, termasuk mencoba berganti-ganti atau menambah jenis usaha baru. Mereka juga menginvestasikan dananya untuk membantu meningkatkan kegiatan usahanya, seperti modal untuk membuka kios, membeli seperangkat meja biliar untuk disewakan, membeli alat penggilingan padi, dan aset lain yang produktif. Selain itu, mereka juga aktif mengikuti kegiatan di lingkungannya, baik yang bersifat sosial maupun kegiatan yang bersifat ekonomi. Beberapa di antara mereka terlibat dalam

kelompok usaha bersama simpan pinjam (UBSP) *Fongasama*, menabung di bank, dan lain sebagainya.

Sedangkan komunitas yang diidentifikasi tidak pernah jatuh ke dalam kemiskinan (*always rich*) umumnya memiliki aset yang cukup, memiliki hubungan yang baik dengan komunitas maupun etnis lain, terlibat di dalam organisasi yang ada di desa/komunitas baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Aset yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan umumnya berupa ternak (misalnya sapi dan babi) yang dikembangkan sekaligus sebagai modal usaha dan untuk berjaga-jaga. Sedang keikutsertaan dalam berbagai organisasi lebih dimotivasi oleh komunikasi antaranggota atau saling tukar-menukar pengalaman dan informasi untuk meningkatkan hasil usaha.

Namun demikian, baik kelompok *movers* maupun *always rich* menemui hambatan dalam menjaga atau meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini disebabkan keberadaan pengungsi yang ditempatkan di wilayah komunitas atau desa ini sejak 1999. Sejak adanya para pengungsi mereka merasakan adanya kasus-kasus pencurian yang meningkat, baik terhadap ternak maupun hasil kebun seperti buah-buahan. Adanya pengungsi membuat warga lokal merasa khawatir kalau pengungsi membeli di kios milik penduduk lokal dengan sistem mengebon. Selain itu, terjadi persaingan dalam menjalankan usaha karena usaha ekonomi pengungsi sebagian sama dengan usaha ekonomi yang dilakukan oleh penduduk lokal seperti bekerja sebagai buruh kasar, membuka warung atau kios, supir angkutan, pencari kayu bakar di hutan, dan kegiatan lain yang tidak memerlukan keterampilan khusus.

Jumlah ternak yang dimiliki penduduk lokal berkurang selama 10 tahun terakhir. Pada 10 tahun yang lalu, terdapat 13% kelompok *mover* yang memiliki ternak babi antara 6-10 ekor, dan kini bahkan tidak satupun kelompok yang memiliki ternak babi antara 6-10 ekor. Demikian juga pemilik ternak babi antara 1-5 ekor, mereka mengalami penurunan untuk semua kelompok, misalnya kelompok *always rich* kepemilikan ternak babi turun dari 40% menjadi 30%, kelompok *movers* turun dari 53% menjadi 47%, kelompok *chronic poor* turun dari 57% menjadi 43%, dan kelompok *faller* turun dari 75% menjadi 50%. Sementara itu, yang tidak memiliki ternak babi justru semakin banyak dalam 10 tahun terakhir untuk semua kelompok. Untuk kelompok *always rich* meningkat dari 60% menjadi 70%, kelompok *movers* meningkat dari 33% menjadi 53%, kelompok *chronic poor* meningkat dari 43% menjadi 57%, dan kelompok *faller* meningkat dari 25% menjadi 50%.

IX. KONFLIK DAN MOBILITAS

A. Keamanan Lokal dan Keselamatan Publik

Kondisi lingkungan Desa Noelbaki, khususnya pada komunitas RW 4, tidak aman dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini terlihat dengan terjadinya berbagai tindak kriminal yang merugikan warga/komunitas tersebut. Tindak kriminal ini meningkat, baik jumlah, variasi, maupun intensitasnya sejak kedatangan pengungsi pada 1999. Jumlah pengungsi yang mencapai 17 ribuan orang ini jauh melebihi jumlah penduduk lokal yang hanya lima ribuan orang. Belum lagi bila ada keributan antara penduduk lokal dengan pengungsi, maka pengungsi yang ada di desa sebelahnya juga ikut membantu pengungsi yang ada di Desa Noelbaki. Tindak kriminal tersebut dapat berupa pencurian, perusakan tanaman di kebun, mabuk-mabukan, perkelahian, percaloan angkutan umum, maraknya judi, penipuan, pemerkosaan, aborsi, perselingkuhan, pelacuran, penyerangan oleh pengungsi, pembakaran rumah, bahkan ancaman pembunuhan. Dari identifikasi dalam FGD Sejarah Konflik dan Peta Kelembagaan kelompok laki-laki diperoleh 12 kasus tindak kriminal dengan empat kasus (pencurian, miras, pajak bemo, dan penipuan) memiliki kecenderungan yang meningkat dalam 10 tahun terakhir, satu kasus (perjudian) sama saja, dan tujuh kasus lainnya menurun. Sedangkan FGD Konflik dan Peta Kelembagaan kelompok perempuan mengidentifikasi 13 kasus tindak kriminal dengan dua kasus (percaloan angkutan umum dan pencurian) berkecenderungan meningkat, tiga kasus (mabuk-mabukan, judi, perselingkuhan) sama saja, dan delapan kasus sisanya menurun dalam 10 tahun terakhir.

Kasus-kasus atau tindak kriminal di atas tetap saja terjadi walaupun komunitas RW 4 telah melakukan berbagai upaya untuk menangkalnya. Usaha-usaha tersebut antara lain berupa rasa saling menghargai dan menghormati antarsesama, menjunjung tinggi tradisi, dibangunnya pos keamanan atau pos jaga, diadakan musyawarah antarelemen masyarakat, meningkatkan rasa waspada saat terjadi pemadaman listrik, jaga/ronda malam, pengadaan hansip/linmas. Namun, upaya ini tidak berhasil secara maksimal sebagaimana yang diharapkan. Pencurian tetap saja terjadi, perjudian (biliar, bola guling, kupon putih) terus berlangsung, konsumsi minuman keras *sopi* (minuman lokal dari penyulingan tuak) berlangsung terus, serta tindak kriminal lainnya.

Penyelesaian kasus-kasus atau tindak kriminal di atas diselesaikan secara berjenjang, bahkan sampai melibatkan pemerintahan di atas, tetapi beberapa di antaranya tidak ada penyelesaian hingga saat ini. Kasus yang diselesaikan sampai melibatkan pemerintahan di atasnya adalah peristiwa perkelahian antara penduduk lokal dengan pengungsi yang diselesaikan dengan sumpah adat dan disaksikan oleh bupati dan ketua DPRD Kabupaten Kupang. Namun, kasus pencurian sampai saat ini masih saja berlangsung bahkan kalau ketahuan (para) pencurinya dengan lantang menjawab “kalau *nggak* boleh diambil pohonnya ditaruh di dalam rumah saja” atau “nanti kan berbuah lagi” (kalau yang diambil, misalnya, semangka). Pencurian ini “dimaklumi” oleh warga, namun ada jenis pencurian yang meresahkan warga, yaitu pencurian hewan atau ternak berupa sapi atau babi. Umumnya pencurian ini dilakukan di malam hari, khususnya pada saat terjadi pemadaman listrik dan dalam keadaan gelap gulita. Kondisi lingkungan desa dan komunitas itu memang minim penerangan jalan, masyarakat mengharapkan pemerintah

daerah melalui instansi yang terkait menyediakan penerangan jalan karena masyarakat membayar pajak penerangan jalan umum (PJU) melalui rekening listriknya.

Dengan adanya berbagai tindak kriminal di atas, komunitas di RW 4 mengalami kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Bahkan, perkelahian antara penduduk lokal dengan pengungsi telah menyebabkan sebagian besar penduduk lokal, khususnya anak-anak dan perempuan, mengungsi ke luar desa. Demikian juga, pencurian telah menghambat peningkatan kesejahteraan warga. Misalnya, ternak yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, dengan berkembang biak, hilang dicuri. Kondisi ini menyebabkan peningkatan yang sangat kecil pola kesejahteraan warga selama satu dekade terakhir. Walau pemerintah daerah telah memindahkan pengungsi yang pada awal kedatangannya berjumlah 17 ribuan orang dan kini tinggal dua-tiga ribuan, warga lokal menginginkan seluruh pengungsi dipindahkan ke luar desa. Kemudian masyarakat akan menata kembali kehidupannya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

B. Sejarah Umum Konflik dan Peta Kelembagaan Konflik-konflik yang Paling Penting

Berbagai konflik telah terjadi di Desa Noelbaki. Secara historis, konflik yang terjadi diidentifikasi dari konflik perebutan air irigasi sebelum dibangunnya Bendungan Tilong, yaitu sejak 1970-an hingga awal 2000. Selanjutnya, masalah penambangan pasir laut di Dusun Kuanoa sejak 1996, kasus pencurian yang meningkat sejak 1999 sampai saat ini, penggunaan tanah warga lokal untuk kuburan ekspengungsi yang meninggal sejak 1999 hingga saat ini, perkelahian antara penduduk lokal dengan pengungsi pada 2000, keributan penduduk lokal dengan pengungsi akibat pajak angkutan umum (bemo) pada 2001, perkelahian penduduk lokal dengan pengungsi setelah para pengungsi mengadakan pesta pada 2003, dan demonstrasi tentang tanah terminal pada 2004.

Dari FGD Sejarah Konflik dan Peta Kelembagaan kelompok laki-laki dan kelompok perempuan diperoleh kesamaan pandangan tentang berbagai konflik yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan komunitas, yaitu masalah (keberadaan) pengungsi di Desa Noelbaki. Awalnya kedatangan pengungsi pada 14 September 1999 di Desa Noelbaki diterima dengan baik oleh warga dan muspida (musyawarah pimpinan daerah) setempat. Jumlah pengungsi saat itu 17 ribuan jiwa, sedangkan warga Desa Noelbaki sekitar lima ribuan jiwa. Tempat yang digunakan untuk penampungan pengungsi adalah terminal, pasar, gedung bekas pabrik kulit, dan BIPP. Bahkan, ibu-ibu PKK desa memasak untuk keperluan konsumsi mereka. Namun, waktu, tiga minggu setelah kedatangannya, pengungsi menilai bahwa masakan ibu-ibu PKK tidak enak dan kemudian dibuang. Hal ini membuat warga, khususnya ibu-ibu PKK merasa tersinggung. Selain itu, sejak kedatangan pengungsi kasus pencurian meningkat. Sejak munculnya berbagai kasus ini timbul ketegangan antara penduduk lokal dengan pengungsi. Peristiwa besar terjadi diawali dengan kasus kecil, yaitu hilangnya sandal bermerek Carvil milik cucu kepala dusun yang sedang mempersiapkan kegiatan menyambut Tahun Baru 2000. Beberapa saat kemudian, pada awal Januari 2000 salah seorang pemuda lokal melihat sandal tersebut dipakai oleh seorang pemuda pengungsi, dan sandal tersebut diminta dengan cara baik-baik. Namun, pemuda pengungsi memberikan sandal tersebut dengan tidak sopan, yaitu sandal masih dipakai dan disodorkan (disorongkan) ke pemuda tersebut. Keributan pun terjadi, dan pemuda pengungsi itu pun lari ke kamp pengungsi sambil berteriak-teriak bahwa orang Los Palos akan dibunuh oleh penduduk lokal. Akibatnya, berdatanganlah

para pengungsi ke tempat kejadian tersebut. Kepala dusun yang berusaha melerai malah menjadi sasaran kemarahan pengungsi dan terjadilah perkelahian yang tidak seimbang, satu orang penduduk lokal dikeroyok ratusan pengungsi. Setelah anggota badan kepala dusun ditombak, disabet dengan parang, namun tidak mempan. Kepala dusun tersebut dibawa ke kamp pengungsi dan dipukul dengan kayu. Namun, tetap saja tidak mempan. Akhirnya datanglah aparat keamanan dan mengamankan kepala dusun tersebut. Ia diungsikan ke Kota Kupang untuk mencegah kerusuhan yang semakin besar.

Beberapa hari kemudian perdamaian pun digelar dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dari kedua belah pihak, penduduk lokal, dan pengungsi. Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang menjadi saksi perdamaian yang menggunakan upacara adat dari kedua belah pihak.

Sejak saat itu, perdamaian tercipta namun ketegangan tetap menyelimuti penduduk lokal sampai saat ini. Bahkan pada 2003 terjadi perselisihan kembali antara penduduk lokal dengan pengungsi terkait dengan pajak bemo (angkutan kota) yang dikenakan oleh para pengungsi terhadap supir-supir yang keluar-masuk terminal, termasuk supir-supir penduduk lokal. Seiring berjalannya waktu, para pengungsi yang ada di Desa Noelbaki pun mulai berkurang karena ada yang kembali ke Timor Leste, ikut transmigrasi lokal, adanya program *resettlement*, atau sebagian membeli tanah/rumah di tempat lain. Kini jumlah pengungsi di Desa Noelbaki tinggal dua-tiga ribu jiwa.

C. Dampak Konflik

Dampak konflik antara penduduk lokal dengan pengungsi dan ketegangan yang masih terasa sampai saat ini terhadap penduduk lokal cukup luas. Dampaknya antara lain mencakup atau terkait dengan kesejahteraan, keamanan, penggunaan lahan, penggunaan fasilitas umum, lingkungan, dan mata pencaharian.

Konflik antara penduduk lokal dengan pengungsi memang tidak merubah jumlah dan komposisi penduduk di Desa Noelbaki. Penduduk lokal dan pengungsi didata oleh masing-masing instansi yang terkait dan berwenang. Penduduk desa didata oleh pemerintahan desa, sedang pengungsi didata oleh dinas sosial. Dengan demikian, keberadaan pengungsi di Desa Noelbaki ini tidak membuat perubahan stratifikasi sosial di desa karena pengungsi terkonsentrasi pada tempat-tempat yang mengelompok, tidak berbaur (tetapi terpisah) dengan penduduk lokal. Keberadaan pengungsi di desa itulah yang memengaruhi kehidupan ekonomi dan mata pencaharian penduduk lokal, walaupun kedua komunitas ini dipisahkan secara kewilayahan, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka saling berinteraksi.

Beberapa jenis mata pencaharian penduduk lokal terpengaruh dengan keberadaan pengungsi di Desa Noelbaki. Mata pencaharian yang sangat terasa pengaruhnya terhadap kesejahteraan penduduk lokal adalah buruh harian, perdagangan sayur dan buah-buahan, dan jasa angkutan umum. Mata pencaharian buruh harian atau buruh kasar penduduk lokal sangat terpukul karena mata pencaharian ini dimasuki atau dikerjakan pula oleh pengungsi dengan cara mau menerima upah yang lebih rendah dari nilai upah yang ditawarkan penduduk lokal. Para pengungsi juga menjual dagangannya, baik sayur-

sayuran maupun buah-buahan, serta kayu bakar dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga jual yang ditawarkan penduduk lokal. “Dulu kami jual sayur 10 ikat Rp1.000 sekarang 20-30 ikat Rp1000, jadi tambah murah” (FGD Tangga Kehidupan, Perempuan, 32 tahun). “Ada persaingan antara penduduk lokal dan pengungsi karena semua lahan dikerjakan oleh pengungsi” (FGD Tangga Kehidupan, Perempuan, 59 tahun).

Kayu mereka tebang dari hutan dan dijual murah kepada masyarakat yang memerlukan. Memang di satu sisi masyarakat mendapatkan harga yang murah, namun di sisi lain hal ini merugikan bagi penduduk lokal yang memiliki mata pencaharian yang sama. Sedangkan jasa angkutan yang terpengaruh dengan keberadaan pengungsi adalah pekerjaan jasa sebagai supir bemo atau angkutan kota. Selain berprofesi sebagai supir bemo, yang jelas-jelas mengurangi kesempatan supir penduduk lokal, pengungsi ini mengutip uang pajak terhadap bemo yang keluar dari dan masuk ke terminal.

Jelas bahwa keberadaan pengungsi ini memengaruhi mata pencaharian penduduk lokal dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Bagi warga yang tanahnya digunakan pengungsi jelas tidak dapat diolah. Ternak milik warga juga banyak yang hilang. Salah seorang peserta FGD menuturkan “sekitar 70-80 ekor sapi hilang” (FGD Sejarah Konflik dan Peta Kelembagaan, Laki-laki, 73 tahun). Bagi penduduk lokal yang berprofesi sebagai buruh atau pedagang sayur/buah atau supir bemo, jelas keberadaan pengungsi sangat berpengaruh karena mereka melakukan pekerjaan yang sama. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat yang akhirnya menyebabkan kesejahteraan penduduk lokal juga menurun, apabila tidak ada sumber penghidupan yang lain. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Desa Noelbaki menilai bahwa keberadaan para pengungsi di desanya tidak memberikan manfaat bagi mereka.

Pada saat konflik berlangsung, berbagai faktor memengaruhi penurunan mobilitas, yakni peningkatan kasus pencurian, pembakaran harta benda seperti mobil milik penduduk lokal oleh pengungsi, perusakan tanaman, terhentinya sebagian kegiatan ekonomi (pertanian, perdagangan, angkutan), terjadinya pengungsian warga lokal ke luar desa untuk menyelamatkan jiwanya, terutama perempuan dan anak-anak.

Konflik yang memengaruhi peningkatan mobilitas bagi komunitas bisa dikatakan sedikit atau kecil sekali. Mereka merasakan keberadaan pengungsi memberikan manfaat adalah para pemilik kios yang menjual kebutuhan sehari-hari dan masyarakat yang menyewakan alat hiburan berupa meja biliar. Namun, hal ini tidak selamanya menguntungkan karena pengungsi yang membeli di kios umumnya mengebon dan yang bermain biliar umumnya membanting stik atau tidak mau membayar bila kalah. Kondisi ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal terhenti atau mengalami stagnasi.

X. STUDI KASUS

Pengungsi: Dilema antara Dampak yang Ditimbulkan terhadap Lingkungan dan Pertimbangan Kemanusiaan (Studi Kasus di Desa Noelbaki)

A. Sejarah Desa

Sejarah pemerintahan Desa Noelbaki dapat ditelusuri dari sejarah masa pendudukan pemerintahan Belanda, yang saat itu dikenal dengan istilah *temukung*, yaitu semacam kepala kampung. Pada saat itu beberapa *temukung* diperintah oleh seorang *vetor* yang merupakan raja kecil yang diberikan kewenangan oleh raja untuk memerintah suatu wilayah. Peralihan sebutan *temukung* menjadi desa mulai dikenal pada 1958, dan saat itu jabatan kepala desa pertama kali di Desa Noelbaki dijabat oleh orang luar (dari Flores).

Desa Noelbaki memiliki wilayah yang cukup luas, 80% wilayahnya merupakan lahan kering dan 20% lahan sawah. Lahan kering pada umumnya dimanfaatkan untuk usaha kebun, tempat pemeliharaan hewan, dan hutan, serta tempat tinggal. Sedangkan lahan sawah dimanfaatkan untuk usaha pertanian dengan menanam tanaman produktif jangka pendek seperti padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan.

B. Kedatangan Pengungsi

Sejarah kedatangan pengungsi di Desa Noelbaki tidak terlepas dari adanya opsi jajak pendapat untuk menentukan nasib sendiri bagi Timor Timur pada 1999, apakah akan tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau merdeka menjadi sebuah negara berdaulat. Beberapa saat setelah diadakan jajak pendapat di wilayah Timor Timur terjadi kekacauan politik dan sosial, di mana rumah-rumah dan perkantoran dirusak dan dibakar. Hal ini menimbulkan kepanikan warga dan akhirnya terjadi eksodus besar-besaran, baik pihak prointegrasi maupun prokemerdekaan, yang mengungsi ke wilayah Timor Barat. Hasil jajak pendapat yang dimenangkan oleh pendukung prokemerdekaan menyebabkan terpisahnya Provinsi Timor Timur dari Wilayah NKRI dan menjadi Negara Republik Timor Leste. Adanya dua kubu pengungsi yang berada di satu tempat, yaitu kubu prokemerdekaan dan kubu prointegrasi, sangat berdampak pada tingginya tingkat kriminalitas di daerah pengungsian.

Desa Noelbaki merupakan salah satu desa di daerah Timor Barat yang menjadi tempat penampungan pengungsi¹⁴ dari Timor Timur tersebut. Pengungsi yang datang ke Kabupaten Kupang ditempatkan di desa-desa Naibonat, Tuapukan, dan Noelbaki. Pengungsi di Desa Noelbaki ditempatkan di terminal dan los-los pasar. Kedatangan pengungsi pertama kali ke Desa Noelbaki terjadi pada Minggu, 9 September 1999. Kedatangan mereka disambut oleh Muspida Provinsi NTT dan Muspida Kabupaten

¹⁴Saat ini di wilayah Timor Barat, pengungsi telah ditangani oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan juga lembaga swadaya masyarakat untuk direlokasi ke tempat-tempat baru (*resettlement*), atau sebagian kembali lagi ke Timor Leste. Di Timor Barat, para pengungsi saat ini disebut dengan berbagai macam sebutan seperti pengungsi, ekspengungsi Tim-Tim, atau warga baru.

Kupang. Juga turut menyambut kedatangan mereka adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Desa Noelbaki.

C. Dampak Kehadiran Pengungsi Secara Umum

Menurut penduduk lokal, sejak kedatangan para pengungsi keadaan keamanan lingkungan, kedamaian, dan ketentraman di desa ini mulai terganggu. Rumah warga setempat sering dilempari batu, mereka membuang kotoran manusia di sembarang tempat seperti di got-got (saluran air) atau di jalan-jalan umum atau bahkan di pekarangan rumah warga yang menyebabkan sanitasi lingkungan menjadi tidak sehat. Pada waktu malam para pengungsi sering membuat keributan, berteriak, dan menyetel radio/tape dengan keras sehingga masyarakat lokal terganggu. Kalau mereka bercakap-cakap, suaranya keras. Selain itu, hasil tanaman kebun seperti pisang, pepaya, semangka, dan lain-lain sering hilang. Begitu juga dengan ternak piaraan warga seperti ayam, babi, dan sapi. Sejak 1999, pencurian semakin meningkat. Nama baik Desa Noelbaki umumnya dan Dusun Kiuteta khususnya menjadi rusak sampai sekarang sebab para pengungsi sering berbuat onar, minum/mabuk, memajak oto (kendaraan umum) yang melewati daerah ini, serta melakukan percaloan angkutan umum.

Salah seorang warga mengemukakan:

Sejak pengungsi datang, rumah saya sering dilempar dengan batu sampai seng atap rumah saya bocor. Padahal sebelum mereka datang rumah ini tidak pernah dilempar. Mereka membuang kotoran atau hajat juga sembarangan antara lain di got atau di bagian belakang rumah saya yang berbatasan langsung dengan tempat penampungan pengungsi. Karena tidak disiram, got tersebut penuh dengan kotoran yang menimbulkan bau yang menyengat dan menyebabkan penyakit sehingga anak-anak jatuh sakit. Malam-malam mereka sering ribut, berteriak, dan *membuka* (menyetel) radio *tape recorder* dengan volume besar-besar sehingga kita tidak bisa tidur nyenyak (wawancara dengan YR Perempuan, 48 tahun, pegawai negeri sipil).

D. Awal Konflik: Pemukulan terhadap Kepala Dusun Kiuteta

Berbagai macam tindakan dan perilaku warga pengungsi tersebut membuat hubungan mereka dengan warga masyarakat setempat kurang harmonis, saling curiga, dan akhirnya memuncak pada awal 2000.

Kejadian berawal dari hilangnya sandal *Carvil* milik salah seorang cucu Kepala Dusun Kiuteta, yang ditaruh di depan rumah saat anak-anak muda Desa Noelbaki sibuk mempersiapkan syukuran Tahun Baru. Sandal ini kemudian dicari ke berbagai tempat, dan pada 2 Januari 2000 akhirnya diketahui sandal tersebut sedang dipakai oleh salah seorang pengungsi. Karena merasa yakin bahwa sandal tersebut adalah milik Pemuda A, maka teman A tersebut yang bernama P, meminta kepada warga pengungsi yang memakai sandal tersebut untuk mengembalikannya kepada Pemuda A. Akhirnya pengungsi tersebut mengembalikan sandal tersebut, tetapi hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sopan, sehingga akhirnya terjadi keributan dan pencuri tersebut dipukul. Warga

pengungsi yang mencuri sandal tersebut kemudian marah-marah dan mengamuk. Tidak puas dengan perlakuan tersebut kemudian pencuri tersebut lari ke kamp pengungsi sambil berteriak “tunggu saya ambil senjata.” Anak-anak muda dari Desa Noelbaki bertambah emosi saat mendengar teriakan tersebut. Kemudian sesampainya di kamp pengungsi, anak pengungsi yang mencuri sandal tersebut berteriak “orang lokal mau bunuh orang Los Palos.” Los Palos adalah nama salah satu kabupaten di Timor Timur.

Akhirnya terjadilah keributan antara pengungsi dengan penduduk lokal. Kepala dusun yang bermaksud mendamaikan malah menjadi sasaran amarah pengungsi. Kemudian kepala dusun diserang dengan menggunakan benda tajam (kalewang) di pinggang sampai tangan dan mengenai tangannya hingga tergores. Kemudian serangan terus berlangsung oleh ratusan pengungsi terhadap dirinya. Kepala dusun juga dipukul menggunakan kayu. Melihat hal itu warga desa berniat membantu kepala dusun tetapi mereka juga diserang oleh pengungsi dengan batu supaya jangan membantu kepala dusun. Karena berbagai senjata tidak *mempun* dipukulkan ke kepala dusun, maka kepala dusun dibawa ke kamp pengungsi. Saat kepala dusun di kamp pengungsi, kemudian datang kepala desa dan tokoh masyarakat untuk melihat kondisi kepala dusun. Bersamaan dengan itu polisi juga datang ke lokasi. Kemudian kepala dusun dibawa polisi ke Kota Kupang untuk dimintai keterangan dan untuk menghindari serangan susulan oleh pengungsi. Semula kepala dusun tidak mau tetapi karena untuk kebaikan warga akhirnya kepala dusun mau pergi ke Kupang, sambil berpesan dan menenangkan warga lokal yang terlanjur emosi ingin membalas serangan tersebut. Kepala dusun berkata kepada masyarakat “Cintailah Noelbaki, jangan merusak Noelbaki, dan jangan lari dari Noelbaki.”

Kemudian kepala dusun pergi ke Kota Kupang untuk dilakukan visum, dan setelah selesai kembali ke rumah. Pada malam harinya kepala dusun mendapat kunjungan dari Bupati Kupang, sekaligus untuk menenangkan suasana dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut. Dua hari kemudian aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat bertemu di Kantor Bupati untuk membahas penyelesaian masalah dan merancang proses perdamaian, dan bahkan dibentuk panitia perdamaian yang diketuai oleh ketua adat Timor Timur (Araujo) dan ketua adat Flores (Petrus Pehang). Dua minggu kemudian perdamaian dilakukan dengan mengikuti tata cara adat masyarakat Timor Barat dan masyarakat Timor Timur. Saat itu kepala dusun memberikan uang tunai sebesar Rp1 juta kepada pengungsi sebagai bentuk kepeduliannya terhadap keadaan mereka. Kemudian utusan pengungsi membalas dengan memberi kain namun ditolak karena dianggap semua masalah sudah selesai dengan perdamaian secara adat. Perdamaian disimbolkan dengan memotong seekor ayam jantan. Ayam dipotong oleh kedua ketua adat (yaitu Petrus Pehang dan Araujo) dan dengan saling berhadapan sambil memegang ayam tersebut, serta di tengah mereka dipancang Tiang Kayu. Setelah dipotong, ayam tersebut digantungkan pada tiang kayu oleh Bupati Kupang sebagai wakil pemerintah dan Ketua DPRD Kupang sebagai wakil masyarakat dengan perjanjian: “Mulai saat ini orang pengungsi dan masyarakat Noelbaki bersaudara.” Upacara perdamaian tersebut disertai sumpah adat, dan siapa yang melanggar sumpah tersebut akan mendapat bahaya.

Tiga hari setelah dilangsungkan perdamaian, Tiang Kayu sebagai simbol perdamaian tersebut ditabrak oleh mobil angkutan kota hingga rubuh. Karena itu kedua ketua adat melakukan pertemuan kembali untuk mengadakan upacara pemulihan dan Tiang Perdamaian tersebut dipindahkan dari tengah terminal ke bagian pinggir terminal. Pada upacara pemulihan tersebut dipotong seekor kambing. Upacara ini juga dihadiri oleh

Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang. Setelah upacara selesai, ketua adat Timor Timur, Araujo berdoa: “Oto (kendaraan) yang menabrak tiang perdamaian akan kena bahaya.” Doa tersebut terbukti karena kemudian diketahui bahwa mobil yang menabrak tiang perdamaian mengalami kecelakaan.

Pada saat perdamaian juga disepakati supaya setiap memasukkan pengungsi ke Desa Noelbaki harus melalui Panitia Adat yang telah dibentuk oleh pemerintah. Tetapi dalam pelaksanaannya ketika pemerintah memindahkan pengungsi dari Gelanggang Olah Raga (GOR) Kupang ke Balai Benih Induk (BBI) tidak melalui panitia adat. Akibatnya terjadi perkelahian antara sesama pengungsi, yaitu pengungsi yang tinggal di terminal Noelbaki dengan pengungsi yang tinggal di BBI.

Kondisi ini menyebabkan para pengungsi lainnya juga ikut marah dan mengamuk dan datang ke rumah kepala dusun dan menyerangnya. Mereka sempat menyerang kepala dusun dengan menggunakan tombak dan parang. Untungnya kepala dusun “ada pakai” (memiliki ilmu) sehingga tidak luka karena kebal. Seorang informan PP¹⁵ mengatakan: “Kalau Pak Niko (Kepala Dusun Kiuteta) tidak “kebal”, mungkin sudah terpotong parang atau tertikam tombak.”

Sementara salah seorang peserta FGD Sejarah Konflik dan Peta Kelembagaan kelompok perempuan (48 tahun), mengatakan:

Sewaktu mereka datang ke rumah kepala dusun mereka mengancam akan membakar rumah-rumah dan membunuh semua orang Flores. Warga di sini awalnya mau berkumpul untuk melawan, tetapi karena jumlah mereka lebih banyak maka warga mengurungkan niatnya untuk melawan. Kami terpaksa mengungsi ke rumah keluarga di luar desa. Keluarga saya sendiri mengungsi ke Oepura. Jumlah warga yang mengungsi sekitar 20-30 kepala keluarga, dan mengungsi selama lebih dari satu minggu.

Apa yang dikemukakan peserta FGD tersebut diperkuat oleh peserta lainnya (Perempuan, 58 tahun) berikut ini:

Mereka berteriak dan mengancam mau membakar rumah warga di dusun ini. Keinginan mereka untuk membakar rumah tidak terlaksana, mereka hanya membakar mobil Taft milik saya, yang kebetulan bertetangga dengan rumah Kepala Dusun Kiuteta.

Sejumlah tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh pengungsi Timor Timur sejak kedatangannya di Desa Noelbaki pada tahun 1999 sampai saat ini, antara lain: (a) penganiayaan dan ancaman akan membakar rumah warga oleh pengungsi itu pada 31 Desember 1999¹⁶; (b) persoalan tanah pertanian antara BLPP dengan pemilik/tuan tanah pada tahun 2002; (c) pelemparan dan perusakan rumah warga setempat oleh pengungsi

¹⁵PP adalah kepala desa pertama di Desa Noelbaki yang terpilih pada 1958 dan saat ini menjadi tokoh masyarakat. Dalam penelitian studi kasus ini, ia menjadi salah seorang nara sumber.

¹⁶Versi lain menyatakan bahwa peristiwa penganiayaan dan ancaman pembakaran rumah oleh pengungsi terjadi pada 12 Februari 2000

pada tahun 2000; (d) penyerangan terhadap warga oleh pengungsi yang berada di Desa Tuapukan pada 2002.¹⁷

E. Kepemilikan Lahan

Kepemilikan lahan di Desa Noelbaki bisa ditelusuri dari keberadaan tuan-tuan tanah di desa sejak dulu. Kepemilikan lahan ini pada umumnya didominasi oleh beberapa keluarga yang lebih dikenal dari marga berikut. Yang paling banyak menguasai lahan adalah marga Keubana, disusul marga Loinati, Nuban, Pito, Kosta, Koten, Dethan, Tuka, Matara, Anin, Sabetu, dan Neno.

Saat ini hanya tinggal empat marga yang masih memiliki lahan lebih dari dua hektar, yaitu marga Keubana, Nuban, Kosta dan Matara. Berkurangnya kepemilikan lahan marga-marga lain disebabkan lahan-lahan tersebut telah dijual kepada pendatang atau orang dari luar desa. Hal ini dilakukan antara lain karena desakan kebutuhan ekonomi.

Penempatan pengungsi di Desa Noelbaki berdampak luas terhadap seluruh sendi kehidupan dan kesejahteraan hidup warga masyarakat di Desa Noelbaki umumnya dan di Dusun Kiuteta khususnya. Dampak tersebut antara lain terungkap dalam peristiwa penting yang langsung atau tidak langsung ikut memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan warga masyarakat di Desa Noelbaki, khususnya di Dusun Kiuteta. Namun yang dikaji dan ditelaah secara mendalam dalam studi kasus ini ialah dampak penempatan pengungsi terhadap pemanfaatan lahan dan lingkungan hidup.

F. Dampak Pengungsi terhadap Pemanfaatan Lahan

Kehadiran pengungsi berpengaruh besar terhadap pola pemanfaatan lahan di Desa Noelbaki. Luas lahan yang dimanfaatkan oleh pengungsi baik untuk usaha pertanian maupun tempat tinggal adalah 31,7 hektar. Tanah yang dimanfaatkan oleh pengungsi tersebut adalah tanah untuk terminal dan pasar, serta lahan dari Balai Benih Induk (BBI) dan Balai Latihan Penyuluh Pertanian (BLPP) Dinas Pertanian Provinsi NTT. Pada awalnya, tanah-tanah tersebut diserahkan oleh warga desa ini kepada Dinas Pertanian bertujuan untuk digunakan sebagai penangkaran benih (pembibitan) padi dan jagung. Sebelum para pengungsi datang, lahan milik Dinas Pertanian tersebut dikerjakan oleh warga desa ini, tetapi kini diusahakan dan dimanfaatkan oleh para pengungsi, dan Dinas Pertanian sendiri sampai saat ini tidak pernah menggunakannya lagi. Luas lahan milik Dinas Pertanian yang dimanfaatkan oleh para pengungsi sekitar 12 hektar.

Para pengungsi juga memanfaatkan tanah-tanah kosong yang berada di pinggir sungai dan terletak di tepi pantai yang sebenarnya diperuntukkan sebagai jalur hijau. Mereka tidak pernah mengambil tanah milik pribadi atau tanah hak perorangan kecuali untuk membangun dapur. Itu pun melalui kesepakatan dengan pemilik tanah.¹⁸ Berbeda dengan

¹⁷FGD Sejarah Konflik dan Peta Kelembagaan kelompok perempuan.

¹⁸Berdasarkan wawancara dengan PP pada 8 April 2006.

pendapat tersebut, ada juga warga yang kehilangan tanah karena ditempati oleh pengungsi.¹⁹

Kehadiran pengungsi dari Timor Timur memengaruhi pekerjaan para petani di Desa Noelbaki pada umumnya dan di Dusun Kiuteta khususnya, baik sebagai penggarap sawah maupun sebagai penanam dan penjual sayur. Sebab saat ini banyak pengungsi yang juga berprofesi sebagai penggarap sawah dan penanam serta penjual sayur. Akhirnya terjadi persaingan dalam memperoleh lahan usaha dan harga sayur. Harga sayur menjadi turun, karena para pengungsi umumnya menjual sayur dengan harga murah. (MK, Petani, laki-laki, 41 tahun).

Apa yang dikemukakan MK tersebut diperkuat oleh pernyataan ST (petani, L, 46) berikut ini.

Keberadaan pengungsi di Desa Noelbaki ini menimbulkan pengaruh yang besar terhadap pekerjaan saya. Banyak dari pengungsi yang ada di Noelbaki ini yang tidak mempunyai keterampilan. Kerjanya tidak jauh berbeda dengan warga masyarakat di sini. Kita garap sawah, mereka juga garap sawah; kita tanam dan jual sayur, mereka juga melakukan yang sama. Warga di sini jual kayu, mereka juga jual kayu. Akibatnya terjadi persaingan dalam usaha sehingga harga turun. Apalagi dalam usaha sayur, rata-rata mereka menjual sayur dengan harga yang lebih rendah sehingga sayur yang dijual oleh warga di sini menjadi tidak laku. Hal ini ditambah lagi dengan perilaku yang aneh-aneh dari para pemuda ekspengungsi ini. Kalau mereka membutuhkan sesuatu, biar sudah larut malam mereka datang dan harus dilayani. Giliran dilayani barangnya mereka ambil tetapi harganya tidak dibayar, katanya bon, tetapi tidak pernah dilunasi. Selain itu, sering ambil buah-buahan seperti papaya, mangga, pisang, dan lain-lain tanpa meminta terlebih dahulu kepada pemiliknya. Bila ditegur biasanya mereka menjawab 'Bapak, nanti berbuah lagi....'

G. Dampak Kehadiran Pengungsi terhadap Lingkungan

Kehadiran pengungsi sebanyak 17 ribuan jiwa di Desa Noelbaki dalam waktu singkat juga telah menimbulkan masalah di bidang lingkungan. Masalah lingkungan yang sangat dirasakan oleh masyarakat Noelbaki khususnya di Dusun Kiuteta adalah menyangkut kotoran manusia. Kedatangan pengungsi dalam jumlah besar yang tidak disertai dengan penyiapan sarana WC telah menimbulkan masalah bagi masyarakat lokal dan masyarakat pengungsi itu sendiri. Menurut warga lokal yang ditemui, kotoran manusia bertebaran di mana-mana di lokasi kamp pengungsi dan pemukiman warga lokal. Hal ini menyebabkan aroma yang "tidak sedap".

Selain itu, dengan kehadiran pengungsi dalam jumlah besar juga menimbulkan masalah lingkungan hidup. Sebagaimana masyarakat perdesaan pada umumnya yang menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak, maka konsekuensi dari kehadiran pengungsi dalam jumlah besar menyebabkan terjadinya pemotongan kayu di hutan yang merupakan lingkungan hijau bagi Desa Noelbaki. Memang selama ini

¹⁹Wawancara dengan MK pada 7 April 2006.

masyarakat lokal juga mengambil kayu dari hutan tersebut, tetapi dengan jumlah pengguna kayu bakar yang meningkat tajam dalam waktu singkat telah mendorong pemotongan kayu secara besar-besaran di hutan tersebut.

Dampak kehadiran pengungsi di Noelbaki terhadap lingkungan antara lain terungkap seperti yang dikatakan MK (petani, Laki-laki, 41 tahun) berikut ini:

Sekarang ada saling tuding di antara warga masyarakat di Kampung Kelapa Tinggi dengan warga masyarakat di Dusun Kuan Noa Desa Noelbaki. Warga Kampung Kelapa Tinggi mendapatkan bencana yang menimpa mereka pada bulan Maret lalu disebabkan ulah dari warga Dusun Kua Noa yang sering menggali pasir di muara sungai Noelbaki. Menurut saya bencana tersebut bukan karena penambangan pasir oleh warga Dusun Kuan Noa - sebab hal ini sudah dilakukan dari dahulu - tetapi karena penebangan dan perusakan hutan bakau oleh pengungsi, sehingga tidak ada lagi bakau yang memeleh (menahan) gelombang air laut. Penebangan hutan bakau oleh pengungsi telah menyebabkan terjadinya abrasi pantai, sebab pada tahun 1996 juga terjadi banjir di sini tetapi warga Kelapa Tinggi tidak kena, karena saat itu masih ada hutan bakau. Masalah penebangan hutan bakau ini sudah lama dilaporkan kepada Gubernur tetapi belum ada tanggapan.

Selain hutan bakau, para pengungsi juga merusak hutan lindung yang ada di Dusun Dendeng seluas 20 hektar. Mereka sering memotong dan menebang pohon kayu di hutan tersebut untuk keperluan kayu bakar, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk dijual. Akibat dari perusakan hutan lindung tersebut, terjadi erosi dan banjir seperti yang terjadi pada Maret 2006 lalu dan menimpa warga di Kampung Kelapa Tinggi, Desa Tarus.

Dampak lingkungan lainnya dengan adanya keberadaan pengungsi di Desa Noelbaki ialah mengenai sanitasi lingkungan. Para pengungsi sering membuang sampah sembarangan. Mereka membuang sampah di got dan di bantaran sungai sehingga pada musim hujan got dan bantaran sungai tersumbat. Akibatnya air mengalir ke sawah-sawah penduduk dan merusak tanaman yang ada di sekitarnya. Di samping itu, mereka juga membuang kotoran manusia secara sembarangan, seperti di pinggir jalan, di got, ataupun di pekarangan rumah penduduk, yang menimbulkan bau dan akhirnya menyebabkan berbagai penyakit seperti diare dan disentri.

H. Bantuan Pemerintah dan Harapan Masyarakat Lokal

Sejak kedatangan pengungsi di Desa Noelbaki telah terjadi berbagai macam peristiwa yang sedikit banyak memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Banyak program dan bantuan yang telah diberikan kepada warga pengungsi baik dari pemerintah maupun dari lembaga nonpemerintah. Namun, perilaku dan tindakan para pengungsi tidak berubah. Oleh karena itu, warga masyarakat Desa Noelbaki sangat mengharapkan agar segera dicarikan tempat yang baru dan lebih layak, sehingga pengungsi dapat menghidupi dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Masyarakat Noelbaki yang ditemui, terutama para peserta FGD, pada umumnya menyatakan bahwa mereka menginginkan kehidupan yang tenteram seperti keadaan

sebelum kedatangan pengungsi. Untuk itu yang terpenting bagi mereka adalah agar pemerintah segera melakukan langkah nyata dalam penanggulangan masalah pengungsi. Masyarakat menghendaki pengungsi yang masih ada sekarang segera dipindahkan dari Desa Noelbaki. Harapan ini didasarkan pada kenyataan bahwa dengan kehadiran pengungsi selama tujuh tahun telah memberikan berbagai masalah pada masyarakat lokal. Permasalahan tersebut antara lain: (1) Tingkat pencurian ternak dan hasil tanaman dapat berkurang dengan keluarnya pengungsi dari Desa Noelbaki sehingga akan menjadi jelas (ketahuan) siapa sebenarnya yang melakukan pencurian selama ini, apakah pengungsi atautkah masyarakat lokal yang memanfaatkan situasi; (2) Pemetongan pohon di hutan untuk kayu bakar dapat dikurangi; (3) Penguasaan pengungsi terhadap lokasi terminal dan pasar Noelbaki harus diakhiri sehingga kesempatan menggunakan lokasi untuk berdagang bagi warga lokal seperti yang sudah dilakukan sebelum pengungsi datang pada 1999 dapat terwujud kembali; (4) Dengan direlokasinya pengungsi dari Desa Noelbaki maka diharapkan rasa was-was yang masih ada di benak pikiran warga lokal serta ketegangan sosial dapat diakhiri.

XI. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas menyangkut dua hal, yaitu berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan warga dan masalah pengungsi. Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas diperlukan peningkatan motivasi dan bantuan pada komunitas. Motivasi komunitas dapat ditingkatkan dengan diberikan pelatihan-pelatihan (termasuk pendampingan), baik oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. Hal ini bisa dikaitkan dengan usaha kecil atau yang terkait dengan sektor pertanian.

Berbagai hal negatif yang selama ini menghambat peningkatan kesejahteraan komunitas salah satunya berasal dari pemerintah dalam bentuk hambatan dalam pemberian izin untuk usaha, baik yang bersifat administratif maupun hambatan teknis dari orang-orang yang seharusnya melayani (memberikan) izin, tetapi merasa usaha warga atau komunitas menjadi saingan usaha dari lembaga tempat pemberi izin usaha tersebut.

Keberadaan para pengungsi di Desa Noelbaki lebih banyak memberikan dampak negatif bagi warga desa tersebut, khususnya warga atau komunitas yang tinggal di wilayah RW 4 dan RW 5 di mana kamp pengungsi berada. Dampak yang paling mencolok adalah terjadinya kasus pencurian yang semakin meningkat, terjadinya keributan atau perkelahian antara pengungsi dengan pengungsi dan antara pengungsi dengan penduduk lokal. Selain itu, di bidang ekonomi para pengungsi juga melakukan kegiatan yang sama dengan penduduk lokal, misalnya menjual hasil buah-buahan dan sayuran dengan harga yang murah. Bila para pengungsi bekerja sebagai buruh, maka mereka mau dibayar dengan upah yang murah, lebih murah dari upah buruh penduduk lokal. Keberadaan pengungsi yang ditempatkan di terminal dan pasar juga mengganggu penggunaan dan fungsi kedua fasilitas umum tersebut.

B. Implikasi Kebijakan

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Noelbaki perlu berbagai implikasi kebijakan yang mendukung upaya penghapusan berbagai hambatan. Hal ini dapat dilakukan pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten, atau pemerintah lokal) dengan memberikan dukungan yang memadai bagi kelompok-kelompok yang selama ini menyokong peningkatan kesejahteraan komunitas. Dukungan tersebut dapat berbentuk bantuan pelatihan atau pendampingan, serta bantuan modal. Kelompok-kelompok etnis dan kelompok tani telah memberikan sumbangan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Kelompok tani melalui pembagian air agar usaha di bidang pertanian dapat berhasil, pengadaan sarana dan prasarana pertanian, pengolahan pascapanen, dan sebagainya. Sementara itu, kelompok etnis umumnya memberikan bantuan modal untuk keperluan konsumsi atau produksi sehingga kesejahteraan para anggota dapat meningkat, minimal dipertahankan. Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya

menyangkut masalah teknis saja, namun harus motivasi agar masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk maju dan berkembang.

Dukungan lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan dalam pemberian/pengurusan perizinan yang menimbulkan *high cost economy* bagi para pengusaha (kecil) lokal.

Terakhir, dan merupakan hal penting bagi masyarakat Desa Noelbaki, adalah penyelesaian masalah (keberadaan) pengungsi yang ada di Desa Noelbaki. Hal ini bisa dilaksanakan melalui program *resettlement*, transmigrasi, atau cara-cara pemindahan lainnya yang dianggap perlu untuk memindahkan para pengungsi dari Desa Noelbaki. Masalah ini mendesak untuk segera diselesaikan mengingat keberadaan pengungsi telah menimbulkan berbagai hal negatif dan masyarakat lokal ingin memulai “hidup baru”. Keberadaan pengungsi di terminal dan pasar telah menghilangkan fungsi kedua fasilitas umum tersebut untuk kegiatan ekonomi warga lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Kupang, *Kecamatan Kupang Tengah dalam Angka 2004*.
- BPS Kabupaten Kupang, *Profil Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kupang 2002*.
- BPS Provinsi NTT, *Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2004/2005*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Endang Poerwanti, *Pemahaman Psikologi Masyarakat Indonesia Sebagai Upaya Menjembatani Silang Budaya* [online] <<http://www.ialf.edu/kipbipa/papers/EndangPoerwati.doc>> (13 Juni 2006)
- Laporan Kepala Desa Noelbaki pada Rapat Lengkap Perangkat Daerah, 30 November 2005.
- Merriam-Webster's Medical Dictionary [online]
<<http://dictionary.reference.com/search?q=disparity>> (9 Juni 2006)
- Suryahadi, Asep, et al (2003) *The Evolution of Poverty during the Crisis in Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- The American Heritage Dictionary of the English Language, Forth Edition [online]
<<http://dictionary.reference.com/search?q=disparity>> (9 Juni 2006)
- WorldNet 2.0, 2003 Princeton University [online]
<<http://dictionary.reference.com/search?q=disparity>> (9 Juni 2006)

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

Ringkasan Kegiatan Studi Lapangan

Kegiatan studi *Moving Out of Poverty* di Kabupaten Kupang secara keseluruhan dilakukan dari 25 Maret hingga 13 April 2006. Kegiatan ini meliputi pengurusan perizinan di tingkat desa dan komunitas, melakukan sembilan wawancara mendalam dan *focused groups discussion* (FGD) di tingkat desa atau komunitas, melakukan wawancara terstruktur menggunakan kuesioner dengan 36 rumah tangga, melakukan 16 wawancara terstruktur tentang sejarah hidup individu, dan wawancara dengan beberapa narasumber untuk satu studi kasus. Untuk setiap kegiatan, dilakukan penulisan laporan dan review serta pengeditan laporan. Kegiatan ini berlangsung dari 25 Maret sampai dengan 10 April 2006. Kerja sama dan bantuan dari Kepala Desa Noelbaki sangat membantu kelancaran studi lapangan ini.

Setelah kegiatan penelitian di lapangan/komunitas, kemudian dilakukan kegiatan penulisan laporan oleh peneliti lokal dari 11 sampai 13 April 2006, dan hasil laporannya dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*. Dalam kurun waktu yang bersamaan juga dilakukan proses pengeditan dan revisi oleh supervisor.

LAMPIRAN 2. Refleksi Metodologi

Kabupaten Kupang dipilih karena merupakan kabupaten yang memiliki jumlah pengungsi dari Timor Timur terbanyak kedua setelah Kabupaten Belu sehingga hipotesisnya memiliki “tingkat atau intensitas konflik yang sedang” antara pengungsi dengan penduduk lokal. Dari 24.524 KK atau 104.436 jiwa pengungsi yang ada di NTT, terdapat 2.553 KK atau 11.360 jiwa pengungsi di Kabupaten Kupang (Data Setda Prov NTT, 2005).

Terdapat empat desa di tiga kecamatan di Kabupaten Kupang yang memiliki jumlah pengungsi cukup banyak dari Timor Timur, yaitu Desa Tuapukan dan Desa Naibonat di Kecamatan Kupang Timur, Desa Noelbaki di Kecamatan Kupang Tengah, dan Desa Bone di Kecamatan Kupang Barat. Kecamatan Kupang Timur (Desa Tuapukan) telah dipilih sebagai desa sampel untuk kegiatan lapangan dalam rangka pelatihan peneliti lokal beberapa waktu sebelumnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini dipilih Kecamatan Kupang Tengah, di Desa Noelbaki.

Beberapa alasan mengapa Desa Noelbaki dipilih. Pertama, dari data Setda diperoleh jumlah pengungsi di Desa Noelbaki saat ini sebanyak 500 KK atau 1.050 jiwa, dan di desa ini terdapat kamp pengungsi. Kedua, Desa Noelbaki dilalui jalur lintas Timor yang memungkinkan ekonomi wilayah ini bersifat dinamis. Ketiga, Desa Noelbaki memiliki struktur penduduk yang terdiri dari berbagai suku dan mata pencahariannya bervariasi.

Sumber informasi Di Desa Noelbaki, penggalan informasi studi “Keluar dari Kemiskinan” dilakukan dengan/melalui:

- Satu penggalan informasi kepada kelompok informan kunci untuk memperoleh informasi umum tentang desa
- Delapan FGD
- Sebanyak 36 kuesioner rumah tangga
- Sebanyak 16 *life story*
- Satu studi kasus tentang dampak lingkungan akibat keberadaan pengungsi dengan beberapa narasumber.

LAMPIRAN 3A.

Ciri-ciri Tangga pada FGD Tangga Kehidupan Kelompok Laki-laki, 2005

Ciri-ciri	Tangga Kehidupan				
	Melarat	Pas-pas	Pas	Cukup	Amuit
Rumah	Tak ada rumah tapi <i>laak</i> (gubug kecil)	Dinding <i>bebak</i> , atap daun, lantai tanah, luas bangunan dari 4m x 6m s/d 5m x 7m	Dinding <i>bebak</i> , atap seng, lantai semen	Rumah tembok, atap seng, luas 6m x 9m atau 8m x 9m, membangun rumah secara bertahap	Rumah tembok, atap seng, lantai semen
Pendidikan	KK: Rata-rata tidak sekolah, ada tamat SD Anaknya sekolah	KK: Tidak sekolah sampai SD Anak: SD-SMA	KK: SD-SMA Anak: SD-SMA	KK: SD-SMA Anak: minimal SMA	KK: SD-sarjana Anak: SD-sarjana
Kesehatan	Bila sakit tinggal tunggu mati saja, pasrah, berobat ke bidan, obat kampung, dukun kampung	Beli obat di kios, pustu, ada yg ke dokter (bila sakit berat)	Beli obat di kios, berobat ke pustu, RSU, dokter	Berobat ke puskesmas, beberapa ke dokter	Berobat ke pustu, puskesmas, rumah sakit, dokter
Pekerjaan	Kerja hari ini untuk makan hari ini, kerja musiman, tergantung tawaran kerja, buruh tani	Petani, buruh tani, buruh bangunan	Petani, PNS rendahan/honoror, wiraswasta	Petani, PNS, pengusaha kecil	Petani, pengusaha, PNS
Penghasilan	Rp150.000 per musim, atau 10.000/bulan	Rata-rata Rp150 ribu per bulan	Rp500 ribu per bulan	Rp750 ribu – 1 juta per bulan	Rp1 juta atau lebih per bulan
Kegiatan sosial	Ikut gotong royong, ikut pemilu, tetapi tidak ikut arisan	Ikut pemilu	Ikut pemilu dan parpol bukan pengurus	Ikut pemilu, ada yang jadi pengurus parpol	Berpartisipasi, biasanya ditokohkan dan dihormati, ikut pemilu, bukan pengurus parpol
Pola makan	Makanannya sederhana	Makan 2 x sehari, nasi, pisang, ubi-ubian	Makan 2 x sehari, nasi, pisang, ubi-ubian, ada lauk	Makan 3 x sehari, nasi, pisang, ubi-ubian, lauk ikan dan sayur	Makan 3 x sehari, nasi, pisang, ubi-ubian, selalu ada lauk ikan dan sayur
Aset	Pakaian susah	Ada ternak kecil (babi, kambing), TV 14-17 inci berwarna atau hitam putih	Sawah, sepeda motor, sapi 2-5 ekor, TV 14-17 inci, HP	Ada mobil untuk angkutan umum, motor pribadi, telepon, parabola, TV 20-21 inci, HP	Perabot rumah tangga lengkap, ada mobil, ada motor, kursi sofa, motor ojek 2 atau lebih, HP, sapi 3-50 ekor

LAMPIRAN 3B.

Ciri-ciri Tangga pada FGD Tangga Kehidupan Kelompok Perempuan, 2005

Ciri-ciri	Tangga Kehidupan		
	<i>Amamuit</i>	Sederhana	<i>Amuit</i>
Rumah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah gubug ▪ Ukuran 3m x 4m ▪ Atap daun/seng ▪ Dinding bebak/kayu/papan ▪ Pelita/listrik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah bebak ▪ Lantai semen ▪ Ada listrik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lantai semen ▪ Atap seng ▪ Dinding tembok ▪ Lantai keramik
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan KK tak sekolah sampai SD ▪ Pendidikan anak SD-SMP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan KK tak sekolah sampai SMA ▪ Pendidikan anak SD sampai sarjana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan KK minimal SD ▪ Anak sekolah SD - sarjana
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berobat pakai obat kampung ▪ Ke pustu ▪ Kartu Askes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berobat ke pustu atau dokter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berobat ke RS atau dokter
Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petani, buruh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai petani, usaha kios, warung makan, supir, ojek, dan dagang kue 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai petani, PNS, swasta, pendeta
Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekitar 30-60 ribu per bulan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rp500 ribu sampai Rp1 juta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimal Rp1,25 juta per bulan
Kegiatan sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilibatkan dalam kegiatan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 50% berpartisipasi dalam kegiatan sosial ▪ Berpartisipasi politik, bukan pengurus partai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlibat sebagai pengurus partai ▪ Ada yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ada yg tidak.
Pola makan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Makan 3 x sehari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Makan 3 x sehari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Makan 3 x sehari dan selalu ada lauk
Aset	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak punya lahan sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Punya TV 14-21 inci warna ▪ Punya motor ojek dan pribadi ▪ Punya lahan maksimal 1 hektar ▪ Punya sapi 1-2 ekor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Punya TV 21-29 inci warna ▪ Punya parabola ▪ Ada yg punya mobil ada yang tidak ▪ Pakaian yang mahal ▪ Punya lahan maksimal 1 hektar ▪ Punya telepon dan HP ▪ Punya sapi 2-3 ekor ▪ Punya ternak kecil

LAMPIRAN 3C.

Matriks Tangga Kehidupan menurut FGD *Ladder of Life* Kelompok Laki-laki
(matriks ini digunakan untuk mengidentifikasi responden rumah tangga)

10 Tahun yang Lalu	Saat Ini						Jumlah
	<i>Susanae</i>	<i>Pas-pas</i>	G a r i s K e m i s	<i>Pas</i>	<i>Cukup</i>	<i>Amuit</i>	
<i>Susanae</i>	24	7, 9, 27					
<i>Pas-pas</i>		1, 16, 19, 22, 23, 25, 28, 35, 36, 37, 49, 50, 51, 60, 62, 66, 69, 72, 73, 74, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99		5, 17, 21, 39, 68, 70, 71,			42 (61%)
Garis Kemiskinan 10 Tahun Yang Lalu Menurut Peserta FGD							
<i>Pas</i>		18, 61	k i n a n	33, 38, 40, 42, 59, 79, 81, 83, 91, 100	2, 14, 26, 31, 44, 58, 64, 65, 75	12, 57	23 (33%)
<i>Amuit</i>			F G D				
JUMLAH	1 (1%)	40 (58%)		17 (25%)	9 (13%)	2 (3%)	69 (100%)

Keterangan: Angka-angka dalam tabel adalah nomor identitas rumah tangga.

LAMPIRAN 3D.

Matriks Tangga Kehidupan Menurut FGD *Ladder of Life* Kelompok Perempuan
(matriks ini tidak digunakan dalam mengidentifikasi responden rumah tangga)

10 Tahun yang Lalu	Saat Ini			Jumlah	
	<i>Amamuit</i>	Garis Kemiskinan	Sederhana		<i>Amuit</i>
<i>Amamuit</i>	2, 12, 15, 25, 31, 34, 37, 41, 42, 55, 60, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 80, 90, 93, 94, 96, 98		3, 5, 6, 28, 32, 35, 43, 48, 62	7, 22, 23, 30	36 (50%)
Garis Kemiskinan 10 Tahun Yang Lalu Menurut Peserta FGD					
Sederhana			50, 51, 66, 67, 82, 84, 87, 88, 99	9, 27, 39, 44, 49, 56, 74, 76	17 (23%)
<i>Amuit</i>	85		24, 46, 95	4, 13, 16, 18, 20, 29, 33, 59, 64, 65, 69, 75, 79, 81, 91, 100	20 (27%)
JUMLAH	24 (33%)		21 (29%)	28 (38%)	73 (100%)

LAMPIRAN 4.
Perhitungan Statistik dari FGD Tangga Kehidupan

4.a. Perhitungan indeks berdasarkan FGD tangga kehidupan kelompok laki-laki

Jumlah Rumah Tangga menurut Kondisi Kesejahteraannya						
10 Tahun yang Lalu	Saat Ini					
	Susanae	Pas-pas	Pas	Cukup	Amuit	Total
Susanae	1	3				4
Pas-pas		35	7			42
Pas		2	10	9	2	23
Amuit						0
Total	1	40	17	9	2	69

Sumber : lampiran 3C

Indeks kesejahteraan = Proporsi dari jumlah rumah tangga yang naik terhadap jumlah seluruh HH

$$\begin{aligned}
 &= (3+7+9+2)/69 \\
 &= 21/69 \\
 &= 0,3043
 \end{aligned}$$

Indeks jatuh miskin = Proporsi jumlah HH yang turun terhadap jumlah seluruh HH

$$\begin{aligned}
 &= 2/69 \\
 &= 0,02898
 \end{aligned}$$

Indeks kesejahteraan net = Proporsi dari jumlah HH yang naik terhadap jumlah seluruh HH

$$\begin{aligned}
 &= \{(3+7+9+2)-2\}/69 \\
 &= 19/69 \\
 &= 0,2753
 \end{aligned}$$

Indeks mobilitas = Proporsi dari jumlah HH yang naik ditambah HH yang turun

$$\begin{aligned}
 &= \{(3+7+9+2)+2\}/69 \\
 &= 23/69 \\
 &= 0,3333
 \end{aligned}$$

Indeks mobilitas masyarakat miskin = Jml HH miskin yang naik / jumlah HH miskin 10 tahun yang lalu

$$\begin{aligned}
 &= (7+3)/(4+42) \\
 &= 10/46 \\
 &= 0,2173
 \end{aligned}$$

Indeks mobilitas masyarakat kaya = Jml dari HH yang naik dibagi jumlah HH kaya 10 tahun yang lalu

$$\begin{aligned}
 &= (9+2)/23 \\
 &= 11/23 \\
 &= 0,4782
 \end{aligned}$$

Indeks Keluar dari Kemiskinan = Jml HH melewati grs kemisk. / jml HH miskin 10 tahun yang lalu

$$\begin{aligned}
 &= 7/(4+42) \\
 &= 7/46 \\
 &= 0,1521
 \end{aligned}$$

Indeks kesejahteraan terbagi = Proporsi HH miskin yg naik – proporsi HH kaya yg naik

$$\begin{aligned}
 &= \{(7+3)/(4+42)\} - \{(9+2)/23\} \\
 &= (10/46) - (11/23) \\
 &= 10/46 - 22/46 \\
 &= -12/46 \\
 &= -0,2608
 \end{aligned}$$

4.b. Perhitungan Indeks Berdasarkan FGD Tangga Kehidupan Kelompok Perempuan

Jumlah Rumah Tangga menurut Kondisi Kesejahteraan				
10 Tahun Yg Lalu	Saat Ini			
	Amamuit	Sederhana	Amuit	Total
Amamuit	23	9	4	36
Sederhana	0	9	8	17
Amuit	1	3	16	20
Total	24	21	28	73

Sumber: Lampiran 3D

Indeks kesejahteraan = Proporsi dari jumlah HH yang naik terhadap jumlah seluruh HH
 $= (9+4+8)/73$
 $= 31/73$
 $= 0,29$

Indeks jatuh miskin = Proporsi jumlah HH yang turun terhadap jumlah seluruh HH
 $= (0+1+3)/73$
 $= 4/73$
 $= 0,05$

Indeks kesejahteraan neto = Proporsi dari jumlah HH yang naik terhadap jumlah seluruh HH
 $= \{(9+4+8)-(0+1+3)\}/73$
 $= 17/73$
 $= 0,23$

Indeks mobilitas = Proporsi dari jumlah HH yang naik ditambah HH yang turun
 $= \{(9+4+8)+(0+1+3)\}/73$
 $= 25/73$
 $= 0,34$

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks mobilitas masyarakat miskin} &= \text{Jml HH miskin yang naik} / \text{jumlah HH miskin 10} \\
 &\quad \text{tahun yang lalu} \\
 &= (9+4)/(36) \\
 &= 13/36 \\
 &= 0,36
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks mobilitas masyarakat kaya} &= \text{Jml dari HH yang naik dibagi jumlah HH kaya 10} \\
 &\quad \text{tahun yang lalu.} \\
 &= (8)/(17+20) \\
 &= 8/37 \\
 &= 0,22
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks keluar dari kemiskinan} &= \text{Jml HH melewati grs kemisk.} / \text{jml HH miskin 10 th} \\
 &\quad \text{yl} \\
 &= (9+4)/36 \\
 &= 13/36 \\
 &= 0,36
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks kesejahteraan terbagi} &= \text{Proporsi HH miskin yg naik} - \text{proporsi HH kaya yg naik} \\
 &= \{(9+4)/(36)\} - \{(8)/(17+20)\} \\
 &= (13/36) - (8/37) \\
 &= 0,14
 \end{aligned}$$